



Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Bengkulu

# RENCANA STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024





## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu) disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, hasil evaluasi Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2015-2019, dan aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 ini memuat tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan Kementerian Agama selaras dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan yang selaras dengan sasaran kegiatan pada Renstra Unit Eselon I tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra di seluruh Satker di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024.

Bengkulu, 17 September 2020  
Kepala,  
  
H. Zahdi, M.HI 



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 495 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :
1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
  2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Provinsi Bengkulu  
pada tanggal 30 September 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU,  
  
Drs. H. ZAHDY, M.HI



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR GAMBAR		vi
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR SINGKATAN		ix
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b>		<b>2</b>
1. 1	Kondisi Umum	2
1. 1. 1	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	3
1. 1. 2	Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	16
1. 1. 2. 1	Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	21
1. 1. 3	Pemenuhan kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	22
1. 1. 3. 1	Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	22
1. 1. 3. 2	Penyuluh Agama yang Kompeten	23
1. 1. 3. 3	Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	26
1. 1. 3. 4	Penghulu yang Kompeten	28
1. 1. 3. 5	Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi	30
1. 1. 4	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	37
1. 1. 5	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	39
1. 1. 5. 1	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	39
1. 1. 5. 2	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	40
1. 1. 6	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	46
1. 1. 7	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	59
1. 2	Potensi dan Permasalahan	64
1. 2. 1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	64
1. 2. 2	Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	65
1. 2. 3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	66
1. 2. 4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	67
1. 2. 5	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	67
<b>BAB II - TUJUAN DAN SASARAN</b>		<b>70</b>
2. 1	Tujuan	70
2. 2	Sasaran Kegiatan	72
2. 3	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	82
<b>BAB III – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>		
3. 1	Target Kinerja	105
3. 2	Kerangka Pendanaan	125
<b>BAB IV- PENUTUP</b>		<b>133</b>
<b>LAMPIRAN : MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 4 PROGRAM</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Indeks Kesalehan Sosial per-Agama Tahun 2019	5
Gambar 1.2	Photo beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan	8
Gambar 1.3	Kontingen lomba pesparawi tingkat nasional di pontianak tahun 2018	10
Gambar 1.4	Peserta seleksi lomba pesparani tingkat provinsi tahun 2018	11
Gambar 1.5	Juara Lomba Sippa Dhamma Samajja Tingkat Nasional Tahun 2018	12
Gambar 1.6	Juara Lomba Swayamwara Dhamma Tripitaka Gatha Nasional Tahun 2017	13
Gambar 1.7	Grafik Indeks KUB di Bengkulu Tahun 2015-2019	17
Gambar 1.8	Dokumentasi Kegiatan Penguatan KUB di Provinsi Bengkulu	19
Gambar 1.9	Kegiatan Kerja sama dalam penyelenggaraan Ibadah Haji	31
Gambar 1.10	Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji di Arab Saudi tahun 2015-2019	31
Gambar 1.11	Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tahun 2017-2019	32
Gambar 1.12	Gedung Asrama Haji Bengkulu yang Sudah Direvitalisasi Tahun 2016	35
Gambar 1.13	Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	48
Gambar 1.14	Grafik APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019	49
Gambar 1.15	Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	49
Gambar 1.16	Grafik APK MA/Ulya/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	50
Gambar 1.17	Grafik APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019	50
Gambar 1.18	Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	51
Gambar 1.19	Grafik APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	51
Gambar 1.20	Grafik Jumlah Siswa RA Tahun 2015-2019	52
Gambar 1.21	Grafik Jumlah Siswa MI Tahun 2015-2019	53
Gambar 1.22	Grafik Jumlah Siswa MTs Tahun 2015-2019	53
Gambar 1.23	Grafik Jumlah Siswa MA Tahun 2015-2019	54
Gambar 1.24	Grafik Nilai Rata-Rata Hasil USBN Tingkat MTs	59
Gambar 1.25	Grafik Nilai Rata-Rata Hasil USBN Tingkat MA	60
Gambar	Grafik Indeks Integritas Siswa Madrasah	61

1.26		
Gambar 1.27	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama 2015-2019	62
Gambar 1.28	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Harmoni Sosial KUB Tahun 2015-2019	62
Gambar 1.29	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan Tahun 2015-2019	63
Gambar 1.30	Capaian Sasaran Strategi Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Tahun 2015-2019	63
Gambar 1.31	Capaian Sasaran Strategi Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun 2015-2019	63
Gambar 1.32	Rerata Capain Kinerja Tahun 2015-2019	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Potret Persentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019	4
Tabel 1.2	Potret Persentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019	4
Tabel 1.3	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019	6
Tabel 1.4	Prestasi Bidang Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah	9
Tabel 1.5	Prestasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf 2015-2019	9
Tabel 1.6	Prestasi Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2015-2019	10
Tabel 1.7	Prestasi Bimbingan Masyarakat Katolik tahun 2015-2019	11
Tabel 1.8	Prestasi Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2015-2019	12
Tabel 1.9	Prestasi Bimbingan Masyarakat Budha tahun 2015-2019	12
Tabel 1.10	Lembaga Keagamaan di Provinsi Bengkulu	15
Tabel 1.11	Lembaga Kegamaan yang Menerima Bantuan	15
Tabel 1.12	Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Provinsi Bengkulu	18
Tabel 1.13	Data Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bengkulu	20
Tabel 1.14	Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar	23
Tabel 1.15	Jumlah Penduduk dan Jumlah Penyuluh Agama Menurut Agama	24
Tabel 1.16	Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi	25
Tabel 1.17	Jumlah KUA yang Memenuhi Standar	27
Tabel 1.18	Jumlah KUA per-Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu	27
Tabel 1.19	KUA Kecamatan yang Dibangun dengan Dana SBSN	28
Tabel 1.20	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi	29
Tabel 1.21	Jumlah Penghulu Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional	30
Tabel 1.22	Pembimbing Ibadah Haji yang telah Memiliki sertifikat Tahun 2015-2019	32
Tabel 1.23	KBH yang Memiliki Izin Operasional Tahun 2015-2019	33

Tabel 1.24	Data Pemberangkatan Jamaah Haji dari Embarkasi Haji Antara Bengkulu Tahun 2015-2019	34
Tabel 1.25	Jumlah Pendaftaran Haji Reguler Tahun 2015-2019	35
Tabel 1.26	Data Lunas Tunda Tahun 2015-2019	36
Tabel 1.27	Data PPIU Tahun 2015-2019	37
Tabel 1.28	Data Penerimaan ZIS Tahun 2015-2019	37
Tabel 1.29	Data Lembaga Zakat Tahun 2015-2019	38
Tabel 1.30	Jenis Pendidikan, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga dan Jumlah Peserta Didik	47
Tabel 1.31	Jumlah Siswa Tahun 2015-2019	52
Tabel 1.32	Jumlah Peserta Didik dan Guru pada Madrasah Tahun 2019	54
Tabel 1.33	Jumlah Alokasi BOP dan BOS bagi Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun 2019	55
Tabel 1.34	Data Madrasah Diniyyah Takmilyah (MDTA) Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020	56
Tabel 1.35	Data Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020	56
Tabel 1.36	Data Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020	56
Tabel 1.37	Data Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang Sudah Bersertifikat se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020	57
Tabel 1.38	Data Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang Belum Bersertifikat se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020	57
Tabel 1.39	Data Sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020	58
Tabel 1.40	Data Pondok Pesantren se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020	58
Tabel 1.41	Jumlah Santri Pondok Pesantren Umum se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020	58
Tabel 1.42	Data Nilai Rata-Rata Hasil USBN	59
Tabel 1.43	Indeks Integritas Siswa Madrasah se-Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019	61
Tabel 2.44	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	83
Tabel 3.45	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Sampai dengan Tahun 2024	107
Tabel 3.46	Rencana Pendanaan 9 (sembilan) Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020	125
Tabel 3.47	Rencana Pendanaan 4 (empat) Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024	126



## DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri

PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
SAPA	Sarapan BersamaPenyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOC	Embarkasi Solo
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas



# BAB I PENDAHULUAN





## BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (Renstra Kanwil Kementerian Agama) periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kanwil Kementerian Agama terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Agama dalam lima tahun terakhir dan berbagai Focuss Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kanwil Kementerian Agama periode 2020-2024.

### I.1. Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kanwil Kementerian Agama Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra Kanwil Kementerian Agama Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu : taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah menyusun 7 (tujuh) misi yang mendukungnya, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan



7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 8 (delapan) tujuan dengan sarannya masing-masing berikut indikatornya guna memudahkan realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama, berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : B-3392/SJ/B.I.1/OT.01.2/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran berikut indikatornya masing-masing, yakni :

1. meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian sasaran dimaksud selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut :

### **1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama**

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator : 1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku, dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui



pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2019 capaian sasaran peningkatan kualitas kehidupan umat beragama di Provinsi Bengkulu sudah baik dengan capain target (81,32%) dan prosentase nilai keaktifan umat beragama pada rumah ibadah sudah baik, yakni di angka 82,37%. Sementara prosentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan berkisar 80,28%. Prosentase baik, walaupun kategori baik namun disisi lain untuk beberapa agama masih kekurangan tenaga penyuluh, sehingga masih ada masyarakat dan tempat ibadah di Bengkulu yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih menyisakan pekerjaan untuk periode berikutnya.

Variasi prosentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Potret Prosentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019							
Jumlah	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Kong hucu	Total
<b>Jumlah Penduduk</b>	1.350.880	25.240	12.453	5.542	2.196	0	1.396.311
<b>Jumlah Yang Aktif pada Rumah Ibadah</b>	1.113.000	21.150	10.250	4.250	1.550	0	1.150.200
<b>Prosentase Keaktifan Umat</b>	82,46 %	79,83%	82,30%	76,68%	70,58 %	0	82,37%

Sumber : KDA 2019 dan Laporan Kinerja 2019

Tabel 1.2

Potret Prosentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan tahun 2019

Jumlah	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghucu	Total
<b>Jumlah Tempat Ibadah</b>	2.024	70	70	9	13	0	2.186

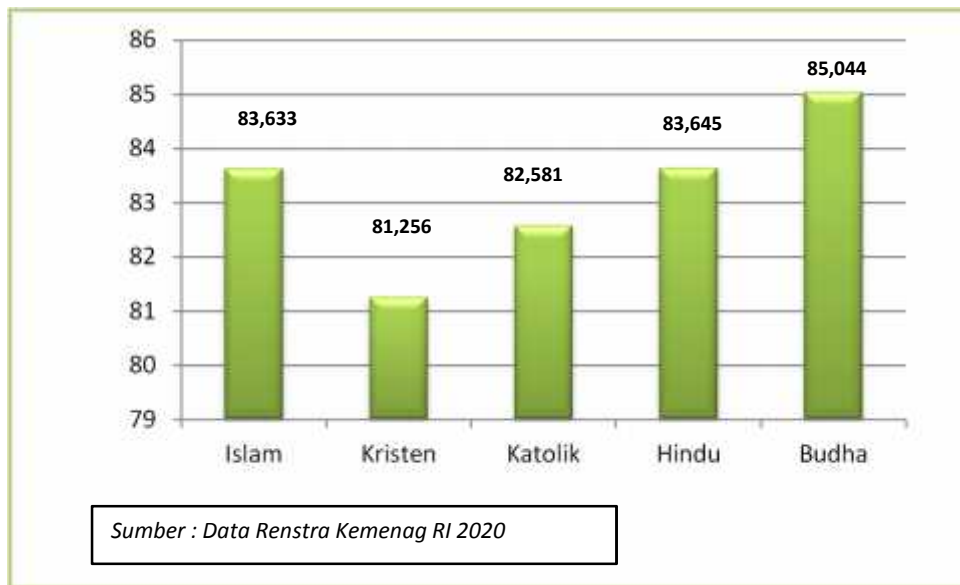


<b>Jumlah Rumah Ibadah yang Melakukan Kegiatan Sosial</b>	1.627	55	56	7	5	0	1.750
<b>Prosentase Peran Rumah Ibadah</b>	80,38%	78,57%	80,00%	77,77%	71,42%	0	80,28%

Sumber : KDA 2019 dan Laporan Kinerja 2019

Kondisi kualitas kehidupan umat beragama di Provinsi Bengkulu tentunya memberikan kontribusi positif terhadap Indeks Kesolehan Sosial secara nasional yang kategorisasi capaian IKS nasional cukup tinggi.

Variasi IKS pada masing-masing kelompok pemeluk agama dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.1  
Grafik Indeks Kesalehan Sosial per Agama Tahun 2019

Tingginya perolehan Indeks Kesalehan Sosial ini dipengaruhi oleh penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan, yang telah diprogramkan pada Renstra sebelumnya, yang didukung dengan kegiatan bimbingan dan fasilitasi keagamaan sebagai berikut:



- ❖ Silaturahmi antar penyuluh agama dengan menyelenggarakan SAPA penyuluh;
- ❖ Silaturahmi Antar Lembaga yang dikenal dengan SALAM;
- ❖ Pembinaan lembaga keagamaan termasuk majelis taklim.

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan spiritual keagamaan bagi umat beragama yang memiliki peranan penting dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah memberikan dukungan dan bantuan dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti MTQ, STQ, PESPARAWI, PESPARANI, Utsawa Dharma Gita, Swayamwara Tripitaka Gatha, Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma. Disamping itu, peringatan Hari Besar Keagamaan pada Tingkat Provinsi, sebagaimana tabel berikut. Tabel 1.3 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019.

Tabel 1.3  
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019

No	Program	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Tahun	Lokasi
1	Bimas Islam	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tk.Provinsi Bengkulu	1 kali	2019	Kab. Muko-Muko
		MTQ Tk. Nasional	2 kali	2016 2018	NTB Sumut
		STQ Tk. Nasional	3 kali	2015 2017 2019	DKI Jakarta Kalut Kalbar
		Hari Besar Islam ) Isra Mi'raj	5 kali	2015 2016 2017 2018 2019	Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya
		) Maulid Nabi Muhammad SAW	5 kali	2015 2016 2017 2018 2019	Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya
		) Nuzul Qur'an	5 kali	2015 2016 2017	Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya





		) Tahun Baru Hijriah	1 kali	2018 2019	Masjid Raya Masjid Raya
		) Idul Adha dan Idul Fitri	10 kali	2017	Masjid Raya
				2015 2016 2017 2018 2019	Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya Masjid Raya
2.	Bimas Kristen	Pesparawi	2 kali	2015 2018	Ambon Pontianak
		Hari Besar Kristen ) Kematian Yesus Kristus (Jumat Agung)	-	-	-
		) Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)	-	-	-
		) Kenaikan Yesus Kristus	-	-	-
		) Kelahiran Yesus Kristus (Natal)	-	-	-
		Hari Besar Kristen Tingkat Provinsi ) Paskah	-	-	-
		) Natal Bersama	5 kali	2015 2016 2017 2018 2019	Gd. Balai Buntar Gd. Balai Buntar Gd. Balai Buntar Gd. Balai Buntar Gd. Balai Buntar Gereja HKBP
3.	Bimas Katolik	Pesparani	1 kali	2018	Ambon
		Hari Besar Katolik	-	-	-
		Hari Besar Katolik Tingkat Provinsi	-	-	-



4.	Bimas Hindu	Utsawah Dharma Gita	1 kali	2017	Sumsel
		Festival Seni Keagamaan Hindu	1 kali	2019	Jawa Timur
		Hari Besar Hindu	-	-	-
		Hari Besar Hindu Tingkat Provinsi (Hari Raya Nyepi/Tawur Agung)	-	-	-
5.	Bimas Budha	Swayamwara Tripitaka (STG) Gatha	1 kali	2017	Jawa Tengah
		Sippa Dhamma Samajja	2 kali	2015 2018	Jakarta Jakarta
		Mahaniti Dhamma Loka	-	-	-
		Hari Besar Budha	1 kali	2018	Hotel Sinar Sport
		Hari Besar Budha Tingkat Provinsi	1 kali	2019	GSG Vihara Panca Karuna Curup



Gambar 1.2  
Photo beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan



Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 telah banyak meraih prestasi tingkat nasional baik pada lomba KUA Teladan, Keluarga Sakinah Teladan, Musabaqoh Baca Kitab maupun Karya Ilmiah dengan capaian prestasi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.4  
Prestasi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

No	Jenis Kegiatan	Prestasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	KUA Teladan	15 besar	12 besar	10 besar	10 besar	Hrpn III
2.	Keluarga Sakinah Teladan	10 besar	15 besar	10 besar	-	-
3.	Penghulu Teladan	-	-	-	-	-
4.	Musabaqoh Baca Kitab	10 besar	10 besar	Juara I	10 besar	10 besar
5.	Karya Tulis Ilmiah	15 besar	11 besar	10 besar	10 besar	10 besar

Sedangkan Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 juga meraih banyak prestasi yaitu :

Tabel 1.5  
Prestasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf 2015-2019

No	Jenis Kegiatan	Prestasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	MTQ Nasional	-	1. Juara III MTQN di Nusa Tenggara Barat Cabang Cacat netra Puteri, a.n Novitasari 2. Juara 2 Tilawah Remaja Puteri A.n Anggi Puteri Suhadi MTQN Di Nusa Tenggara		1. Juara 2 Cabang Tilawah Golongan Canet Puteri a.n Novitasari 2. Juara 1 MTQN Korpri di Jakarta Cab. Ceramah, a..n Irwansyah,	Juara 1 MTQN Antar Mahasiswa golongan Tartil di Aceh a.n Andika Dharma Putera



			Barat		M.Ag	
			3. Cabang Khath Juara Harapan 3			
2.	STQ Nasional	-	-	-	-	-

Di kalangan umat Kristen, Bimbingan Masyarakat Kristen mengukir prestasi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.6  
Prestasi Bimbingan Masyarakat Kristen tahun 2015-2019

No	Jenis Kegiatan	Prestasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Vocal Group	-	-	-	Medali Emas	-
2.	Seni Kategori Etnik	-	-	-	Medali Perak	-
3.	Solo anak 7-9 tahun	-	-	-	Medali Perak	-
4.	Solo Remaja Pemuda Putri	-	-	-	Medali Perak	-
5.	Musik Pop Gerejawi	-	-	-	Medali Perak	-
6.	Paduan Suara Anak	-	-	-	Medali Perak	-
7.	Paduan suara remaja pemuda	-	-	-	Medali Perak	-
8.	Paduan Suara Wanita	-	-	-	Medali Perak	-
9.	Paduan Suara dewasa Campuran	-	-	-	Medali Perak	-
10.	Paduan Suara Pria	-	-	-	Medali Perak	-
11.	Solo Remaja Putra	-	-	-	Medali Perak	-
12.	Solo Anak 10-13 Tahun	-	-	-	Perunggu	-



Gambar 1.3  
Kontingen lomba Pesparawi Tingkat Nasional di Pontianak tahun 2018



Di kalangan umat Katolik, Bimbingan Masyarakat Katolik mengukir sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.7  
Prestasi Bimbingan Masyarakat Katolik tahun 2015-2019

No	Jenis Kegiatan	Prestasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pesparani	-	-	-	16 besar	-



Gambar 1.4  
Peserta Seleksi lomba Pesparani Tingkat Provinsi Tahun 2018



Di kalangan umat Hindu, Bimbingan Masyarakat Hindu mengukir sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.8  
Prestasi Bimbingan Masyarakat Hindu tahun 2015-2019

No	Jenis Kegiatan	Prestasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pasraman	-	Harapan II	-	-	-
2.	Keluarga Sakinah Telandan Hindu	-	-	Harapan III	-	-
3.	Festival Seni Keagamaan Hindu	-	-	-	-	Harapan III

Di kalangan umat Budha, Bimbingan Masyarakat Budha mengukir sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.9  
Prestasi Bimbingan Masyarakat Budha tahun 2015-2019

No	Jenis Kegiatan	Prestasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Swayamwara Dhamma Tripitaka Gatha	-	-	Harapan I Liam Keng	-	-
2.	Sippa Dhamma Samajja	Juara II Tk. SMP (cergam)	-	-	Harapan I tk. SMA (nyanyi)	-
		Juara II Tk. SMA (cergam)				



Gambar 1.5  
Juara Lomba Sippa Dhamma Samajja Tingkat Nasional Tahun 2018



Gambar 1.6  
Juara lomba Swayamwara Dhamma Tripitaka Gatha Nasional tahun 2017



Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan, dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat. Peran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah memberikan pembinaan keagamaan dengan menyiapkan materi, sosialisasi, dan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Hasilnya peningkatan pemahaman keagamaan pada majelis keagamaan dan kelompok binaan.

Mulai Tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (wasathiyah), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, menghormati kemajemukan.

### Penguatan Penyebaran Pesan-pesan Keagamaan







Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, baik tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, lembaga keagamaan dalam membantu penyelesaian konflik keagamaan. Lembaga keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aktivitas keagamaan di provinsi Bengkulu. Lembaga keagamaan berhasil mengembangkan inisiatif dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana umat menjadi lebih memberikan manfaat bagi umat dan sekitarnya.

1.10 Tabel Lembaga Keagamaan di Provinsi Bengkulu

No	Jumlah Lembaga Keagamaan				
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
JUMLAH	24 Lembaga	8 Lembaga	13 Lembaga	23 lembaga	13 lembaga

Sumber : PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (update Juni 2020)

Kemitraan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Data jumlah lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan, jenis bantuan, dan volumenya disajikan dalam tabel berikut ini.

1.11 Tabel Lembaga Keagamaan yang Menerima Bantuan

No	Lembaga Keagamaan	Jenis Bantuan	Jumlah Lembaga Keagamaan yang Menerima Bantuan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Islam	1. Bantuan Operasional	-	11	10	11	11
		2. Sosialisasi dan Koordinasi	NA	NA	11	11	11
2.	Kristen	1. Bantuan Operasional	17	10	10	1	8
		2. Sosialisasi dan Koordinasi	14	15	12	11	15
3.	Katolik	1. Bantuan Operasional	3	3	2	2	2
		2. Sosialisasi dan Koordinasi	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Hindu	1. Bantuan Operasional	20	5	5	13	10
		2. Sosialisasi dan Koordinasi	40	10	10	26	20
5.	Budha	1. Bantuan Operasional	4	2	1	5	4
		2. Sosialisasi dan Koordinasi	4	2	1	5	4

Sumber : Data Bidang Urais, Penais dan Pembimas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu



Kontribusi lembaga keagamaan yang paling signifikan adalah sebagai pembina dalam bimbingan umat beragama untuk menumbuhkan kesadaran saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta kerukunan umat beragama.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mencakup penanganan masalah aliran keagamaan, pencegahan pornografi dan pornoaksi, pencegahan radikalisme, pembinaan organisasi keagamaan wanita, dan pengimplementasian pengarusutamaan gender.

### **1.1.2 Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis**

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai simpul utama dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial keberagamaan masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan desa percontohan Kerukunan Umat Beragama di desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara.

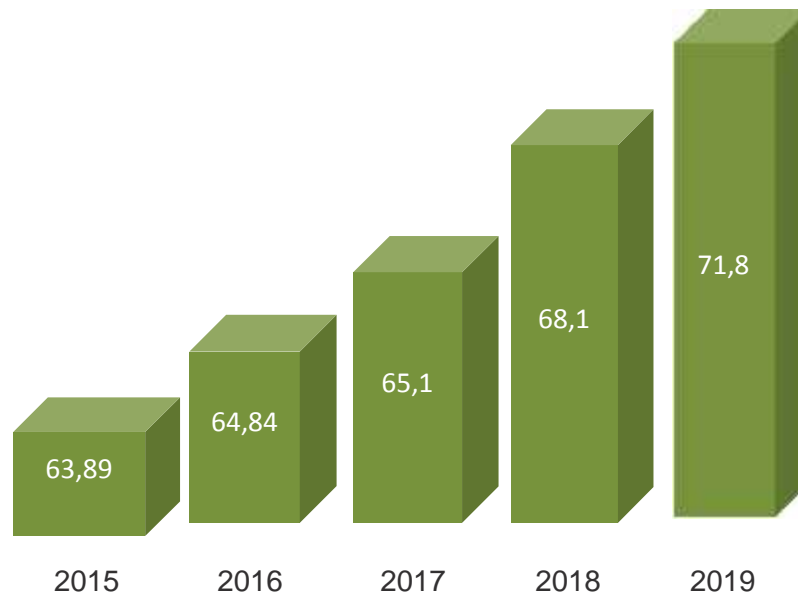
Kerukunan umat beragama merupakan kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di wilayah Provinsi Bengkulu serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Bengkulu yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, knowledge sharing aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat Beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa : (1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) provinsi dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei yang dilakukan Litbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Provinsi Bengkulu yang mencakup tiga dimensi, yaitu : 1. Toleransi, 2. Kesetaraan, 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk



memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama di Bengkulu. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif. Capaian indeks KUB Tahun 2015 – 2019 di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Balitbang dan Diklat Kementerian Agama

Gambar 1.7  
Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama di Bengkulu  
Tahun 2015 – 2019

Capaian indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bengkulu cenderung meningkat di tahun 2015 menuju 2019, Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Bengkulu Bengkulu dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama berjalan dinamis dan kondusif.

Konflik antara umat beragama di provinsi Bengkulu nyaris tidak ada, walaupun ada namun tidak sampai mengganggu distabilitas dan tidak sampai mencuat ke permukaan. Pada tahun 2019 tercatat hanya 2 konflik namun dapat diselesaikan.

Penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu. Konflik yang terjadi pada umumnya dipicu adanya kurangnya komunikasi dan kesalah pahaman. Kanwil Kementerian Agama selalu hadir pada setiap konflik yang terjadi untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian. Adapun jumlah konflik yang terselesaikan selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 1.12  
Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama  
Di Provinsi Bengkulu

Jumlah	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Target jumlah penyelesaian konflik	NA	NA	NA	NA	2	2
Jumlah Konflik yang terselesaikan	NA	NA	NA	NA	2	2
Prosentase	NA	NA	NA	NA	100%	100%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja 2019

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya desa percontohan Kerukunan Umat Beragama di Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2018. Disamping itu, untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan kerukunan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga melakukan ajakan untuk hidup rukun melalui pencetakan pamflet dan pemasangan baliho sebagai upaya untuk menunjang kerukunan.

Upaya penguatan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda lintas agama, pelajar dan mahasiswa serta masyarakat serta melakukan MOU pembinaan umat beragama dan penanggulangan paham radikalisme dengan Polda Bengkulu.





#### PEMBINAAN LEMBAGA AGAMA DAN TOKOH AGAMA



#### MOU/ORIENTASI DAN MELAKUKAN KEGIATAN KEBERSAMAAN ANTARA UMAT BERAGAMA



#### DESA BINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DESA RAMA AGUNG KABUPATEN BENGKULU UTARA



Gambar 1.8  
Dokumentasi Kegiatan Penguatan  
Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bengkulu

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Provinsi Bengkulu, adalah fakta masyarakat Bengkulu yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat



menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama di Bengkulu.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s.d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural. Dialog moderasi beragama, dialog tokoh agama, yang didalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan multi-religi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara.

Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengkordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

Untuk meningkatkan moderasi beragama di Provinsi Bengkulu tentunya komunikasi antar tokoh agama perlu dibina sebagai upaya untuk menyamakan persepsi tentang moderasi beragama, semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Provinsi Bengkulu telah terbentuk 11 Forum Kerukunan Umat Beragama, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antara tokoh agama tentang pentingnya moderasi beragama untuk meningkatkan kualitas Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bengkulu.

Tabel 1.13  
Data Forum Kerukunan Umat Beragama  
Di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Provinsi Bengkulu	1
2.	Kota Bengkulu	1
3.	Kabupaten Bengkulu Utara	1



4.	Kabupaten Bengkulu Selatan	1
5.	Kabupaten Rejang Lebong	1
6.	Kabupaten Kaur	1
7.	Kabupaten Seluma	1
8.	Kabupaten Kepahiang	1
9.	Kabupaten Mukomuko	1
10.	Kabupaten Lebong	1
11.	Kabupaten Bengkulu Tengah	1
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber : Data Subbag. Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

### 1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu : komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Provinsi Bengkulu, adalah fakta masyarakat Bengkulu yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika.*" Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama Provinsi Bengkulu.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s. d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural, dialog moderasi beragama dan dialog tokoh agama, yang didalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat.



### 1.1.3 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai institusi vertikalnya. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di wilayah Provinsi Bengkulu ditandai dengan beberapa indikator, yaitu :

- 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar,
- 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi,
- 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar,
- 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi, dan
- 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi.

#### 1.1.3.1 Rumah Ibadah Yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib.

Sampai dengan tahun 2019, telah tersedia 3.369 masjid/mushola, gereja Kristen/rumah kebaktian 77, 70 gereja Katolik/paroki/stasi/kapel, 9 pura dan sanggar, 7 rumah ibadah Buddha (vihara, cetiya, kelenteng). Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama selama kurun waktu 2015 - 2016 adalah sebagai berikut:





Tabel 1.14  
Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah rumah Ibadah	850	1.254	1.485	1.705	1.750

Sumber: Laporan Capain Kinerja 2015-2019

Tahun 2015-2019 Tempat Ibadah yang memenuhi standar terus mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan total jumlah tempat ibadah yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu 3.532 : 1.750 maka diperoleh persentase tempat ibadah yang memenuhi standar yaitu 49,54 % ini artinya belum sampai separoh dari tempat ibadah yang memenuhi standar, hal ini wajar karena tempat ibadah yang mendapatkan bantuan fasilitasi peningkatan pelayanan masih relatif kecil, didasarkan pada jumlah anggaran bantuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan sangat terbatas.

Sementara itu untuk tahun 2018 dan 2019 didasarkan pada pendataan mengenai rumah ibadah yang dinilai memenuhi standar kenyamanan umat yang meliputi keamanan, kebersihan, sehat dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan. Sampai dengan akhir periode Renstra, sudah lebih dari 50% rumah ibadah di wilayah Provinsi Bengkulu yang memenuhi standar pelayanan yang dinilai baik.

### 1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten

Sejak semula penyuluh agama merupakan salah satu ujung tombak Kementerian Agama dengan tugas fungsinya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat ditengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan. Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama Islam sebanyak 981 dengan rincian berstatus PNS sebanyak 87 orang dan Non PNS sebanyak 894 Jumlah warga Provinsi Bengkulu pemeluk Agama Islam sebanyak 1.951.605 orang dengan demikian 1 orang penyuluh melayani 1.989 orang.

Untuk jumlah penyuluh agama Kristen pada tahun 2019 sebanyak 40 orang dengan rincian berstatus PNS sebanyak 0 orang dan Non PNS sebanyak 40 orang. Jumlah warga Provinsi Bengkulu pemeluk agama Kristen sebanyak 33.227 orang dengan demikian 1 orang penyuluh melayani 831 orang.

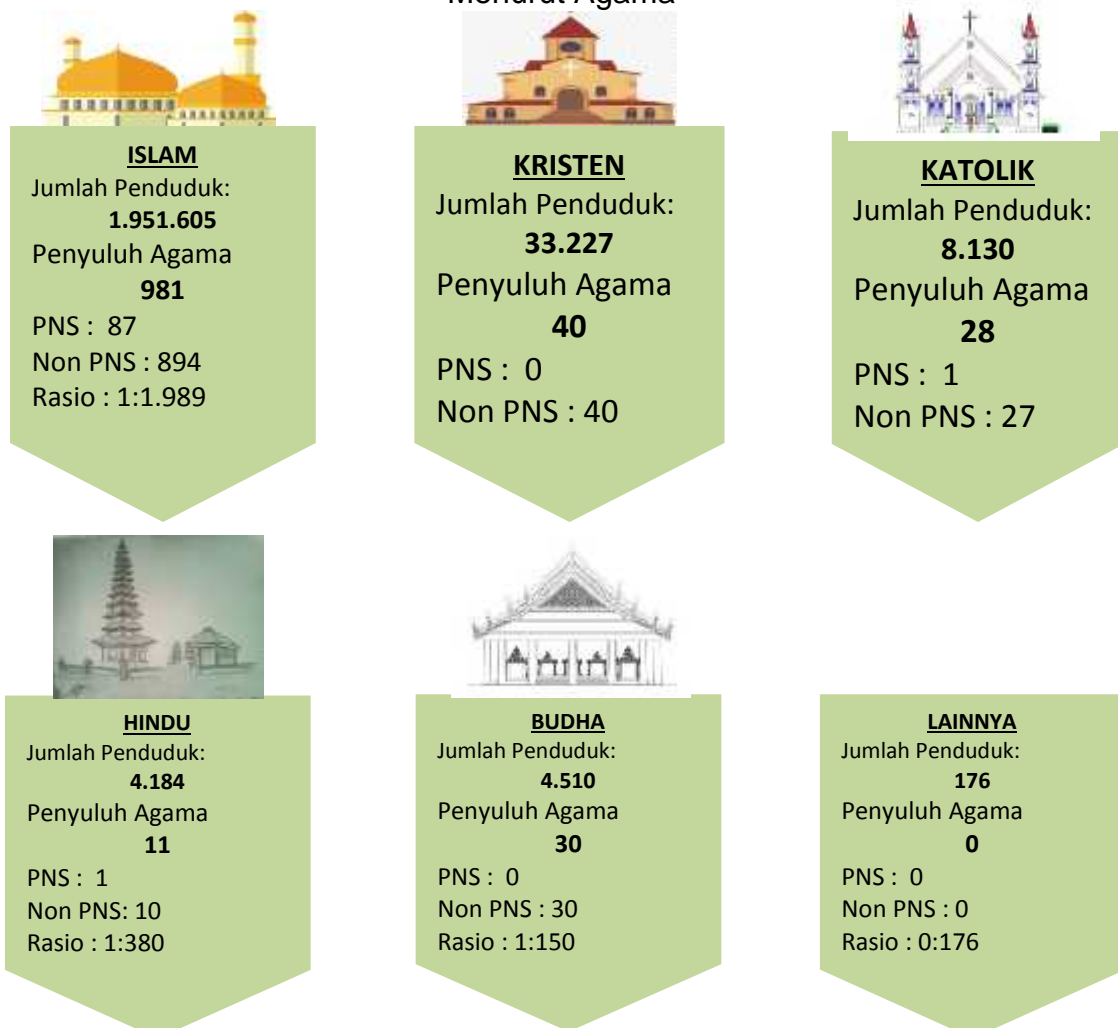


Sedangkan jumlah penyuluh Agama Katolik pada tahun 2019 sebanyak 28 orang dengan rincian berstatus PNS sebanyak 1 orang dan Non PNS sebanyak 27 orang. Jumlah warga Provinsi Bengkulu pemeluk Agama Katolik sebanyak 8.130 orang dengan demikian 1 orang penyuluh melayani 290 orang.

Selanjutnya untuk jumlah penyuluh agama Hindu pada tahun 2019 sebanyak 11 orang dengan rincian berstatus PNS sebanyak 1 orang dan Non PNS sebanyak 10 orang. Jumlah warga Provinsi Bengkulu pemeluk Agama Hindu sebanyak 4.184 orang dengan demikian 1 orang penyuluh melayani 380 orang.

Jumlah penyuluh agama Buddha pada tahun 2019 sebanyak 30 orang dengan rincian berstatus PNS sebanyak 0 orang dan Non PNS sebanyak 30 orang. Jumlah warga Provinsi Bengkulu pemeluk Agama Budha sebanyak 4.510 orang dengan demikian 1 orang penyuluh melayani 150 orang.

Tabel 1.15  
Jumlah Penduduk dan Jumlah Penyuluh Agama Menurut Agama





<b>JUMLAH</b>	<b>2.001.832</b>	<b>89</b>	<b>1.001</b>	<b>1.090</b>	<b>1:1.836</b>
	<b>Jumlah Penduduk Bengkulu</b>	<b>Penyuluh PNS</b>	<b>Penyuluh Non PNS</b>	<b>Total Penyuluh Agama</b>	<b>Rasio</b>

Sumber :Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu dan Bimas Budha Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu tahun 2020

Sampai tahun 2019, bahwa jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani, ini ditunjukkan pada tabel di atas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani 1.834 umat beragama secara rata-rata Provinsi, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terus berusaha meningkatkan jumlah penyuluh agama di Provinsi Bengkulu.

Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatory SAPA penyuluh.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama, sehingga kompetensi seorang penyuluh sangat dibutuhkan,



untuk melihat jumlah penyuluh agama yang memenuhi standar kompetensi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut ini :

Tabel 1.16  
Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi

JUMLAH	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	KET
Jumlah Penyuluh Agama	350	470	400	530	557	

Sumber : Capaian Kinerja tahun 2015-2019

### 1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti :Deklarasi Integritas Layanan KUA; Penguatan Zona Integritas Kepala KUA; Penguatan Zona Integritas Penghulu; Penilaian KUA Percontohan/teladan; Pembinaan SDM Kepenghulan; Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah; Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah; Focus Group Discussion (FGD) dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA.

Dari upaya kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Promemperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif .

Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan; Standar Operasional Prosedur dan



Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di semua KUA Kecamatan; Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh semua Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan; Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA; Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNPB on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta; Kutipan akta nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah; Hasil survey pengendalian gratifikasi kepada walinikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000,- , calon pengantin/wali nikah setor langsung di Bank serta tiada biaya tambahan di KUA; Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya.

Tabel 1.17  
Jumlah Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar

JUMLAH	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	KET
Jumlah KUA	55	70	75	80	95	

Sumber : Capaian Kinerja tahun 2015-2019

Sampai awal Renstra ini di susun jumlah Kantor Urusan Agama Kecamatan seprovinsi Bengkulu berjumlah 126 Kantor Urusan Agama yang tersebar pada 10 Kanupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu, sehingga dengan jumlah tersebut diharapkan dapat melayani masyarakat yang akan mengurus Nikah dan Rujuk, roncian jumlah Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Provinsi Bengkulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.18  
Jumlah Kantor Urusan Agama Per-Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KUA	Keterangan
1.	Kota Bengkulu	8	
2.	Kabupaten Bengkulu Utara	17	
3.	Kabupaten Bengkulu Selatan	11	
4.	Kabupaten Rejang Lebong	15	
5.	Kabupaten Kaur	15	
6.	Kabupaten Seluma	14	



7.	Kabupaten Kepahiang	8
8.	Kabupaten Mukomuko	15
9.	Kabupaten Lebong	12
10.	Kabupaten Bengkulu Tengah	11
	Jumlah	126

Sumber : Data Bidang Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Sampai tahun 2019 sudah 17 Kantor Urusan Agama yang ditingkatkan fisik bangunannya serta sarana penunjang lainnya melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sehingga kualitas layanan di Kantor Urusan Agama dapat lebih maksimal lagi.

Tabel 1.19  
Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di bangun dengan menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Provinsi Bengkulu

No	KUA Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
1.	KUA Kecamatan Pondok Kubang	Bengkulu Tengah	
2.	KUA Kec. Bang Haji	Bengkulu Tengah	
3.	KUA Kec. Pondok Kelapa	Bengkulu Tengah	
4.	KUA Kec. Merigi Kelindang	Bengkulu Tengah	
5.	KUA Kec. Pagar Jati	Bengkulu Tengah	
6.	KUA Kec. Kabawetan	Kepahiang	
7.	KUA Kec. Bermani Ilir	Kepahiang	
8.	KUA Kec. Argamakmur	Bengkulu Utara	
9.	KUA Kec. Kerkap	Bengkulu Utara	
10.	KUA Kec. Batik Nau	Bengkulu Utara	
11.	KUA Kec. Putri Hijau	Bengkulu Utara	
12.	KUA Kec. Ipuh	Mukomuko	
13.	KUA Kec. Kota Mukomuko	Mukomuko	
14.	KUA Kec. Lubuk Pinang	Mukomuko	
15.	KUA Kec. Pelabai	Lebong	
16.	KUA Kec. Pino Raya	Seluma	
17.	KUA Kec. Kaur Selatan	Kaur	

Sumber : Data Bidang Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

### 1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi



Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah :

- o Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- o Pengawasan pencatatan NR;
- o Pelaksanaan pelayanan NR,
- o Penasehatan dan konsultasi NR;
- o Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- o Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- o Pembinaan keluarga sakinah;
- o Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

Kompetensi seorang penghulu dalam mengemban tugas sebagai pengemban visi dan misi Kementerian Agama dalam memberikan layanan pernikahan dan rujuk kepada masyarakat muslim yang ada di provinsi Bengkulu merupakan sesuatu yang mutlak adanya, sehingga dengan modal kompetensi tersebut masyarakat dapat terlayani dengan baik, untuk melihat jumlah capaian penghulu yang memenuhi standar kompetensi dari tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.20  
Jumlah Penghulu yang memenuhi Kompetensi

JUMLAH	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	KET
Jumlah Penghulu	20	25	30	40	50	

Sumber : Capaian Kinerja tahun 2015-2019

Jumlah antara ketersediaan tenaga penghulu dengan jumlah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada di provinsi Bengkulu masih tidak seimbang, karena kondisi geografi Bengkulu yang rata-rata daerah pedalaman, sehingga untuk menjangkaunya dengan jumlah penghulu yang ada tentu agak kesulitan. Potret data jumlah penghulu berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsionalnya dapat dilihat dalam tabel di berikut ini:



Tabel 1.21  
Jumlah Penghulu Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional

JUMLAH	PENGHULU			TOTAL
	PERTAMA	MUDA	MADYA	
Penghulu	43	23	0	66

Sumber : Data Bidang Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

### 1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi

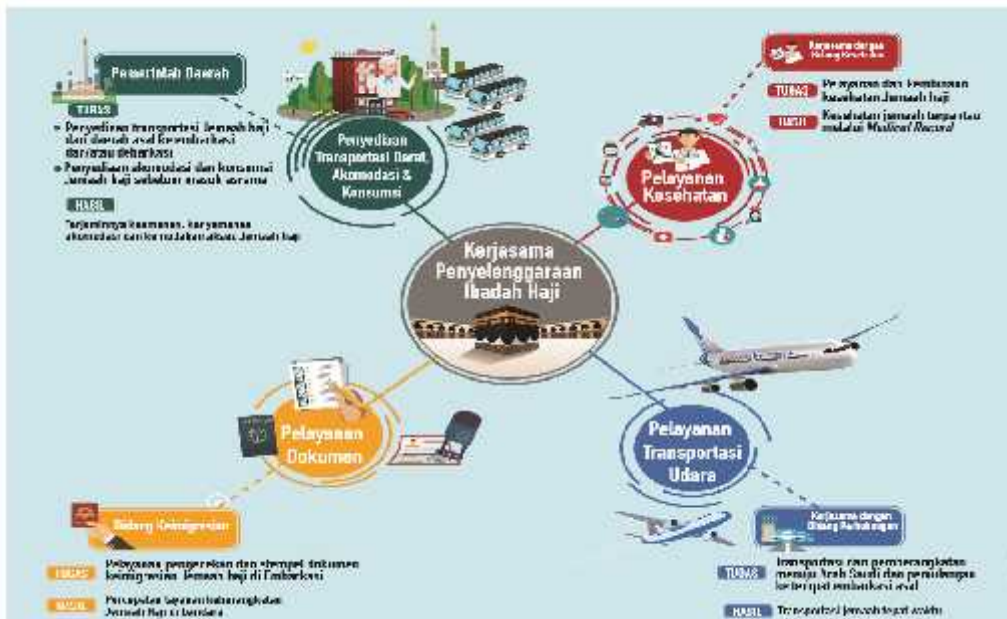
Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Ibadah Umrah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Untuk meningkatkan kualitas layanan, pada tahun 2019 telah dilakukan 10 inovasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. penyediaan jalur fast track di seluruh embarkasi;
2. sistem sewa hotel full musim di Madinah sebanyak 76%;
3. penomoran tenda Arafah dan Mina berisi Nomor Tenda, Nomor Kloter dan Kapasitas Tenda, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi jemaah;
4. revitalisasi Satuan Tugas Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina);
5. penggunaan sistem laporan haji terpadu (Haji Pintar) dalam Laporan Petugas Kloter;
6. moderasi berhaji melalui penguatan manasik, dengan penambahan materi sejarah haji;
7. revitalisasi Kantor Daerah Kerja baru;
8. integrasi rekam kesehatan jemaah;
9. zonasi wilayah akomodasi di Makkah; dan
10. pemasangan AC di tenda Arafah.

Inovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait sehingga koordinasi dalam penyelenggaraan ibadah haji baik dalam negeri maupun di luar negeri, disamping itu peningkatan kualitas petugas hajipun terus diupayakan dengan harapan semua petugas haji bisa melaksanakan tugasnya dengan profesional dan memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji. Model kerjasama dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat dilihat dalam gambar berikut :





Gambar 1.9  
Kegiatan Kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berkat kerja sama tersebut, terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dengan indikasi: (1) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi; dan (2) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri. Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri selama lima tahun disajikan dalam Gambar 1.9 dan 1.10 berikut:



Sumber : Ditjen PHU, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.10  
Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi tahun 2015-2019



Sumber data : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.11  
Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji  
Dalam Negeri tahun 2017-2019

Peningkatan indeks tersebut bukan tanpa usaha yang optimal dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dilakukan dengan program sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, hal ini dilakukan karena Provinsi Bengkulu masih menginduk ke-Embarkasi Padang, tujuan dari program ini dimaksudkan sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jumlah Pembimbing ibadah haji di Provinsi Bengkulu yang telah memiliki sertifikasi pembimbing dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 1.22  
Pembimbing Ibadah Haji yang Telah Memiliki Sertifikat tahun 2015-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMBIMBING IBADAH HAJI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI PER-TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kota Bengkulu	2	NA	NA	3	7
2.	Bengkulu Utara	NA	NA	NA	4	2
3.	Bengkulu Selatan	NA	NA	NA	3	1
4.	Rejang Lebong	NA	NA	AN	2	1



5.	Mukomuko	1	NA	NA	2	2
6.	Seluma	1	NA	NA	2	1
7.	Kaur	1	NA	NA	2	1
8.	Kepahiang	NA	NA	NA	1	1
9.	Lebong	NA	NA	NA	1	2
10.	Bengkulu Tengah	NA	NA	NA	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>20</b>	<b>18</b>

Sumber : Data Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2020

Selama ini bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji tidak dapat maksimal, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berusaha melakukan sosialisasi kepada jamaah calon haji untuk melakukan bimbingan manasik haji secara mandiri dengan mengikuti program bimbingan yang diadakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang telah memiliki izin operasional, jumlah KBIH yang telah memiliki izin operasional sampai awal tahun 2020 berjumlah 11 KBIH, progres perizinan KBIH di tahun 2020 ini lebih tinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Data KBIH yang memiliki izin operasional tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.23  
KBIH yang memiliki izin operasional tahun 2015-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KBIH PER-TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kota Bengkulu	2	4			
2.	Bengkulu Utara					
3.	Bengkulu Selatan				1	
4.	Rejang Lebong		1			
5.	Mukomuko				1	
6.	Seluma					
7.	Kaur					
8.	Kepahiang					
9.	Lebong					
10.	Bengkulu Tengah				2	
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Sumber : Data Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2020

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah KBIH yang sudah memiliki izin operasional di Provinsi Bengkulu masih sangat sedikit, sehingga Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga berupaya melakukan percepatan proses perizinan KBIH.

Pada tahun 2013 dilakukan peningkatan status asrama Haji Bengkulu menjadi Asrama Haji Antar, sehingga proses CIQ yang tahun sebelumnya dilakukan di



Embarkasi Padang (PDG), maka mulai tahun 2013 proses CIQ dilakukan di Bengkulu, ini artinya terjadi peningkatan sehingga kualitas layanan jamaah haji di Bengkulu dapat ditingkatkan, proses alih status asrama haji antara ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Daerah provinsi Bengkulu, mulai tahun 2013 sampai saat ini biaya transportasi dari Embarkasi Haji Antara ke Embarkasi Padang Pulang dan pergi ditanggung oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan. Jumlah pemberangkatan jamaah haji dari Embarkasi Haji Antara Bengkulu pada tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.24  
Data Pemberangkatan Jamaah Haji dari Embarkasi Haji Antara Bengkulu Tahun 2015-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI PER-TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kota Bengkulu	251	244	309	312	378
2.	Bengkulu Utara	156	155	200	201	239
3.	Bengkulu Selatan	101	102	130	127	152
4.	Rejang Lebong	178	181	233	233	275
5.	Mukomuko	133	138	177	172	199
6.	Seluma	134	134	171	171	199
7.	Kaur	84	83	107	105	126
8.	Kepahiang	89	84	109	106	127
9.	Lebong	75	78	92	93	109
10.	Bengkulu Tengah	73	72	91	92	103
<b>JUMLAH</b>		<b>1274</b>	<b>1271</b>	<b>1619</b>	<b>1612</b>	<b>1907</b>

Sumber : Data Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2020

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kualitas layanan akomodasi bagi jamaah haji selama berada di Asrama Embarkasi Haji Antara dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasana fisik asrama haji, maka pada tahun 2016 dan 2020 asrama haji Bengkulu mendapatkan anggaran revitalisasi dan pengembangan asrama haji melalui pembiayaan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN).

Pada tahun 2016 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah memperoleh alokasi dana SBSN sebesar Rp. 53 395.999.000,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk revitalisasi dan pengembangan asrama haji, dan pada tahun 2020 kembali Kantor Wilayah



Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah memperoleh alokasi dana SBSN sebesar Rp. 53.453.000.000,- (lima puluh tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk revitalisasi dan pengadaan sarana pendukung asrama haji.



Gambar 1.12  
Gedung Asrama Haji Bengkulu yang Sudah Direvitalisasi tahun 2016

Animo masyarakat Provinsi Bengkulu untuk berhaji cukup tinggi karena setiap tahunnya terjadi peningkatan pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, sampai saat ini daftar tunggu haji (waiting list) di Provinsi Bengkulu sampai 25 tahun, data pendaftaran haji lima tahun terakhir (tahun 2015-2019) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.25  
Jumlah Pendaftaran Haji Reguler Tahun 2015-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDAFTARAN HAJI PER-TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kota Bengkulu	5632	6136	6695	7367	8104
2.	Bengkulu Utara	1802	1999	2209	2544	2862
3.	Bengkulu Selatan	1311	1620	1844	2121	2058
4.	Rejang Lebong	2893	3294	3589	3907	4120
5.	Mukomuko	1621	1855	2234	2499	2709



6.	Seluma	916	1171	1461	1894	2162
7.	Kaur	552	969	1082	1170	1255
8.	Kepahiang	1439	1726	1865	1963	2087
9.	Lebong	810	993	1078	1245	1374
10.	Bengkulu Tengah	637	827	1015	1158	1319
<b>JUMLAH</b>		<b>17613</b>	<b>20590</b>	<b>23072</b>	<b>25868</b>	<b>28050</b>

Sumber : Data Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2020

Daftar tunggu haji juga dipengaruhi oleh adanya jamaah yang melakukan penundaan keberangkatan seperti tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.26  
Data Lunas Tunda Tahun 2015-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH JAMAHAH LUNAS TUNDA PER-TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kota Bengkulu	4	2	2	0	0
2.	Bengkulu Utara	0	0	2	0	0
3.	Bengkulu Selatan	0	1	0	0	1
4.	Rejang Lebong	2	0	2	0	3
5.	Mukomuko	1	0	0	3	4
6.	Seluma	0	0	1	0	0
7.	Kaur	0	0	1	0	0
8.	Kepahiang	1	0	1	1	0
9.	Lebong	0	0	0	0	0
10.	Bengkulu Tengah	0	0	0	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

Sumber : Data Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2020

Di bidang umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terus melakukan pembenahan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan cara mensurvei langsung PPIU yang akan mengajukan izin operasional di Provinsi Bengkulu, disamping itu juga dilakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan satuan kerja Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu serta melakukan pembinaan kepada PPIU yang telah mendapatkan izin operasional. Potret data PPIU yang sudah memperoleh izin operasional dari tahun 2015-2019 di Provinsi Bengkulu dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 1.27  
Data PPIU Tahun 2015-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	DATA PPIU PER-TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kota Bengkulu		3	6	2	6
2.	Bengkulu Utara					
3.	Bengkulu Selatan					
4.	Rejang Lebong				1	
5.	Mukomuko					
6.	Seluma					
7.	Kaur					
8.	Kepahiang					
9.	Lebong					
10.	Bengkulu Tengah					
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

Sumber : Data Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2020

#### 1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan Lembaga keagamaan di Provinsi Bengkulu telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi umat beragama di wilayah Provinsi Bengkulu, Data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa zakat dan tanah wakaf menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan ternyata cukup besar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.28  
Data Penerimaan ZIS Tahun 2015-2019

No	Penerimaan ZIS	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zakat	6.872.133.444	8.116.177.172	13.130.424.419	13.433.254.575	16.010.904.928
2.	Infak dan Sedekah	25.395.360	NA	NA	3.862.497.086	1.316.452.453

Sumber : Data Bidang Penais Zawa



**Tabel 1.29**  
**Data Lembaga Zakat Tahun 2015-2019**

No	Penerimaan ZIS	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BAZNAS Provinsi	1.641.361.038	1.792.711.776	4.582.421.261	3.943.791.682	4.364.238.576
2.	BAZNAS Kab/Kota	5.256.167.766	6.323.465.396	7.330.300.707	10.945.862.944	12.971.701.474
3.	UPZ/LAZ	-	-	1.217.702.451	2.406.097.025	1.382.722.338
<b>JUMLAH</b>		<b>6.897.528.804</b>	<b>8.116.177.172</b>	<b>13.130.424.419</b>	<b>17.295.751.661</b>	<b>18.718.662.388</b>

Sumber : Data Bidang Penais Zawa

Selain itu, Seksi Pemberdayaan Wakaf juga ikut mendorong terjadinya peningkatan potensi ekonomi keagamaan yang berupa pemberdayaan Tanah Wakaf yang ada di Provinsi Bengkulu dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah tanah Wakaf di Provinsi Bengkulu sejumlah 3.203.151 persil dengan perincian sebagai berikut :

- a. Harta Benda Wakaf berupa Tanah Sudah Bersertifikat : 3.001.020 Persil;
- b. Harta Benda Wakaf berupa Tanah belum Bersertifikat : 202.131 Persil

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selama ini telah berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam, dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberian Apresiasi Bagi Lembaga dalam Pengelolaan ZIS dan Administrasi terbaik;
2. Launching Kampung Zakat & Wakaf
3. Mengikuti Kegiatan Even Nasional ZAKAT AWARD;
4. Pemberian Apresiasi Bagi Lembaga dalam Pengelolaan ZIS dan Administrasi terbaik;
5. Publikasi dan Sosialisasi Kesadaran menunaikan Zakat pada BAZNAS dan Lembaga yang telah berizin melalui Baliho , Televisi Nasional/Swasta dan Media Sosial.

Selain itu, Bidang Penerangan Islam, Zakat dan Wakaf juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lainnya termasuk infaq dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an.

Melalui pembimas Katolik, skema ekonomi keagamaan berasal dari Kolekte, Stipendium, dan lura Stole yang dilakukan oleh setiap gereja didorong untuk ditingkatkan, selain pengumpulan dana Badan Amal Kasih Katolik (BAKAT).

Sementara itu, Pembimas Kristen mendorong Lembaga yang mengelola dana ekonomi keagamaan Kristen yaitu Lembaga Sumbangan





Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk ditingkatkan. Melalui Pembimas Hindu juga digali potensi ekonomi keagamaan yang berasal dari dana punia. Sementara pada agama Buddha, ekonomi keagamaan dapat bersumber dari Amisa Dana, Paricaya Dana, Abhaya Dana, dan Dhamma Dana. Untuk meningkatkan pendapatan dari potensi ekonomi keagamaan secara optimal, kebijakan pemberian insentif perlu dibuat.

### 1.1.5 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu : (1) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; (2) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

#### 1.1.5.1 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2016 berhasil mencapai Sangat baik (94,39) dan meningkat di Tahun 2018 memperoleh predikat Sangat Baik (96,22). Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan. Perolehan akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.

Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan lebih lanjut diantaranya :

- a. Dokumen Renstra belum sepenuhnya selaras dengan Renstra Kementerian Agama;
- b. Target dalam rencana aksi baru sebatas target tahunan, dan belum di breakdown secara teknis yang mendeskripsikan output dan outcome kegiatan disertai penanggung jawab dan time schedule rencana aksi;
- c. Evaluasi rencana aksi belum dilakukan.

Pengukuran Kinerja, dengan maksimal bobot nilai 25 %, Hal yang masih menjadi permasalahan dan harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :

- a. Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya belum dibuat
- b. Pedoman atau SOP terkait pengumpulan data kinerja hanya SOP Penyusunan LKj dan penyampaian LKj;
- c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian reward & punishment masih di bawah 70%;



- d. IKU telah dilakukan reviu namun tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan telah direviu.

Pelaporan Kinerja, dengan maksimal bobot nilai 15%, Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :

- a. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome atau output penting;
- b. Laporan Kinerja berisi sebatas informasi tentang efisiensi sumber daya yang dilakukan;
- c. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.

Evaluasi Internal, dengan maksimal bobot nilai 10%, hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :

- a. Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi, namun belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya;
- b. Pemantauan rencana aksi hanya sebatas pada isu utama saja;
- c. Evaluasi rencana aksi hanya dilakukan secara semester;
- d. Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti melalui forum rapat pimpinan namun baru mencapai 75%;
- e. Hasil tindaklanjut evaluasi rencana aksi belum menunjuk penanggung jawab dan waktu pelaksanaan.

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, dengan maksimal bobot nilai 20%, hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah : Untuk meningkatkan Capaian Kinerja.

#### **1.1.5.2 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilaksanakan sejak tahun 2014, dimulai dari sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan kemudian dilanjutkan dengan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Pada awalnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu hanya melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Pusat, namun, pada tahun 2017 penilaian mandiri terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa satuan kerja Kementerian Agama mulai diimplementasikan.

Hal yang perlu dipahami bahwasannya bagian terpenting dalam pengukuran ketercapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu cara penilaian yang dilakukan adalah mengkuantifikasi kualitas ketercapaian, sehingga output yang dihasilkan adalah kualitas dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan bukan kuantitas (jumlah) output yang dihasilkan. Sehingga pada akhirnya, penilaian reformasi birokrasi tidak hanya sekedar formalitas “*evidence based*” melainkan “*impact based*”.



Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak lepas dari pengejawantahan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Hukum dan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata laksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator-indikator dari 8 (delapan) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Dalam perjalanannya, penilaian mandiri Reformasi Birokrasi mengalami beberapa kali perubahan, terutama perubahan pada komposisi prosentasi penilaian di masing-masing indikator area perubahan, hal ini disebabkan adanya penambahan indikator di beberapa area perubahan.

#### 1. Manajemen Perubahan

Didalam area perubahan Manajemen Perubahan, pada penilaian mandiri Reformasi Birokrasi ditahun 2017, terdapat 4 (empat) indikator dalam Manajemen Perubahan yaitu : pembentukan tim Reformasi Birokrasi, Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi, Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, dengan total nilai capaian maksimal adalah 16. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan manajemen perubahan di tahun 2017 adalah Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama dan menerapkan ASN Berbudaya Kerja (setiap tahun), penetapan *Agent of Change* di Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Membangun RB-ZI corner sebagai *centre of excellence* dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang berfungsi sebagai : pusat edukasi dan literasi (mendukung *knowledge management*), pusat Informasi (mendukung keterbukaan Informasi Publik) dan pusat komunikasi (mendukung perbaikan pelayanan publik).

Hal-hal yang masih harus diperhatikan pada area perubahan ini adalah masih kurangnya motivasi tim kelompok kerja reformasi birokrasi dalam menjalankan ketugasannya dalam tim. Hal tersebut selain dikarenakan ketugasan dalam tim bukan merupakan tugas pokok dan fungsi kedinasannya, perlunya apresiasi khusus terhadap kerja tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi oleh pimpinan. Dukungan anggaran terkait kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan Manajemen Perubahan perlu lebih ditingkatkan.

#### 2. Penataan Hukum dan Perundang-undangan

Pada area perubahan Penataan Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 2017, terdapat 3 (tiga) indikator yaitu harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Evaluasi Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Agama dan Membangun system pengendalian perundang-undangan pada Kementerian Agama dengan total nilai capaian maksimal adalah 4. Hasil evaluasi capaian



Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penataan Hukum dan Perundang-undangan di tahun 2017 adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu belum melakukan pemetaan dan dokumentasi yang memadai terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron serta Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangundangan belum dilakukan. Pada tahun 2017, nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penataan Hukum dan Perundang-undangan adalah 0,00 dari nilai total maksimal 4.

Hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam hal ini adalah perlunya sistem informasi satu pintu terhadap dokumentasi peraturan perundang-undangan seluruh unit kerja di subbagian Hukum dan Kepegawaian sehingga dapat sistematis dan terpantau. Selain itu, perencanaan terhadap monitoring dan evaluasi perundang-undangan, sosialisasi dan kajian rutin terhadap peraturan perundang-undangan yang baru terbit di seluruh bidang dan unit kerja perlu mendapat perhatian khusus.

### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi di tahun 2017 tidak dilakukan penilaian dengan pertimbangan penataan dan penguatan organisasi merupakan kewenangan Pusat. Sehingga capaian maksimal di area perubahan ini adalah 0. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melakukan fasilitasi dalam area ini dengan melakukan beberapa hal diantaranya adalah penetapan penataan organisasi baik di Kantor Wilayah, Kementerian Agama Kabupaten hingga madrasah dan KUA. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil analisis jabatan dan beban kerja pegawai. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga mengusulkan kepada Biro ortala pusat terkait dengan penyempurnaan nama jabatan, tugas, dan fungsi dalam peraturan menteri agama nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama.

Pada tahun 2018 dan 2019, Penilaian area perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi dinilai melalui 2 (dua) indikator yaitu Evaluasi organisasi dan analisis jabatan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu masih melakukan hal yang sama yaitu terkait usulan dan kajian PMA 19 tahun 2019 terkait Organisasi tata kerja (vertikal) pada kementerian Agama yang baru. Peta jabatan sudah disusun, Analisa jabatan untuk masing-masing pegawai juga sudah dibuat, namun masih sebatas pegawai dengan jabatan fungsional umum saja dan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait hal tersebut.

Adapun hal yang harus diperhatikan adalah masih perlunya kajian-kajian terinci terkait organisasi yang *right sizing* dan *right function* yang berdasarkan aturan-aturan yang berlaku serta



rekomenadasi yang dapat ditindak lanjuti dan segera diambil Langkah untuk perbaikan di masa yang akan datang, misalnya : kajian terkait urgensi jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

#### 4. Penguatan Tata Laksana

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah menyusun SOP untuk Kantor Wilayah dan untuk kantor Kementerian Agama Kab/Kota serta SOP layanan unggulan, pengembangan *e-government*, antara lain : *e-PTSP*, *e-REKOM*, *e-learning*, *e-kinerja*, *e-RPD*. Penyusunan SOP yang ada belum seluruhnya diselaraskan dengan proses bisnis yang baru ditetapkan dan SOP belum dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, efektivitas birokrasi serta belum dilakukan evaluasi secara berkala. Sistem Informasi digital atau *e-government* sudah mulai dikembangkan dan diimplementasikan. Namun, karena satu dan lain hal, *e-government* belum dapat diintegrasikan baik ditingkat Kantor Wilayah maupun tingkat pusat. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik tidak dilakukan secara berkala.

Area Perubahan Penataan tata laksana ditahun 2018 dan 2019 mempunyai 5 (lima) indikator penilaian yaitu Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, Pengelolaan kearsipan, Keterbukaan informasi publik, *e-government* dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pada tahun 2018 dan 2019, SOP telah dilakukan evaluasi dan disinkronkan dengan peta proses bisnis yang memang baru disusun ditahun 2018. Pengelolaan kearsipan dapat lebih tertib karena didukung oleh JFT Arsiparis dalam pelaksanaannya. Keterbukaan Informasi Publik sudah mulai berjalan efektif dan optimal selain karena adanya peran pranata humas dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi public yang akurat, benar.

Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan di area perubahan ini adalah perlu adanya sinkronisasi peta proses bisnis dan SOP dengan jabatan pelaksana yang terbaru (PMA 19 tahun 2019) dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala, digitalisasi kearsipan yang memadai dan perlunya ruang arsip yang memadai untuk arsip seluruh unit kerja satu atap kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Bengkulu, perlu adanya SK MORA *cyber team* untuk lebih melugaskan peran MORA *Cyber team* dalam ketugasannya, *e-government* perlu dikembangkan lebih lanjut dan mengintegrasikannya dengan sistem informasi (aplikasi) lainnya baik dari pusat, pemerintah daerah atau *stakeholder* lainnya, maupun pegawai.

#### 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur terdapat 7 (tujuh) indikator yaitu : Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan dan promosi pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan



pegawai berbasis kompetensi, Penetapan kinerja individu, Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan dan Sistem Informasi Kepegawaian. Adapun Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di tahun 2017 adalah melalui kegiatan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi, Assessmen telah dilakukan terhadap sebagian besar pejabat.

Namun, disisi lain belum dilakukannya Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta pelaksanaan penilaian kinerja individu masih terbatas pada pemenuhan target dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan belum dikaitkan dengan kinerja organisasi. Selain itu, belum dilakukannya monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja individu yang belum dijadikan dasar sebagai pembayaran tunjangan kinerja.

Ditahun 2018 dan 2019, area perubahan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur memiliki 8 (delapan) indikator penilaian yaitu Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai, Pengadaan Pegawai, Pangkat dan Jabatan, Pengembangan Karir, Pengembangan Kompetensi dan Sistem Informasi Manajemen Karir, Penilaian kinerja dan disiplin, penghargaan, Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan serta Sistem Informasi Kepegawaian.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditindak lanjuti di area perubahan ini adalah : perlu disusun dokumen pengembangan karir dan Analisa kebutuhan diklat pegawai serta sosialisasi kebutuhan diklat kepada seluruh pegawai sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, melakukan proses penerimaan pegawai Non PNS secara transparan melalui satu pintu sehingga kebutuhan pegawai non PNS dapat dipantau termasuk alokasi anggaran terhadap pegawai Non PNS. Dalam hal system informasi kepegawaian, perlu Membangun Sistem Informasi Manajemen Karier PNS dan sinkronisasi e-kinerja Kantor Wilayah dengan system absensi sehingga dapat terintegrasi dan terukur.

#### 6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas terdapat 2 (dua) indikator yaitu : keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan akuntabilitas adalah kontrak kinerja bagi seluruh pejabat dan pegawai melalui perjanjian kinerja telah disusun dan kontrak kerja serta pembangunan sistem e-kinerja sudah mulai diimplementasikan yang nantinya diharapkan akan terintegrasi dengan SIMPEG. Keterlibatan pimpinan sudah optimal pada saat penyusunan renstra dan perjanjian kinerja ditandai dengan keterlibatan secara langsung dalam melakukan pemantauan kinerja secara berkala. Upaya peningkatan kapasitas SDM dibidang Akuntabilitas Kinerja oleh unit kerja belum dilakukan



secara optimal. Sistem Pengukuran Kinerja yang berbasis elektronik (e-kinerja) mulai diimplementasikan tahun 2017.

Hasil capaian dari implementasi penguatan akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan sudah digunakannya Dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kerja dan dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan melibatkan pimpinan. Rencana kinerja tahunan sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja pimpinan dan dipublikasikan di website agar diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat sebagai bagian dari janji pelayanan. Pengejawantahan Perjanjian Kinerja ke lini bawah melalui Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian target kinerja pegawai telah dilakukan melalui system informasi (aplikasi) e-kinerja sehingga dapat terukur.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam area perubahan ini adalah perlunya diklat yang berkesinambungan terhadap pegawai yang baru menjalankan tugas fungsi penyusunan laporan kinerja.

#### 7. Penguatan pengawasan

Penguatan Pengawasan terdapat 6 (enam) indikator yaitu : Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan pengawasan di tahun 2017 meliputi : Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah menetapkan kebijakan secara formal tim penanganan gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan. Namun, disisi lain Kementerian Agama Provinsi Bengkulu belum melakukan evaluasi kebijakan secara berkala terhadap penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan. Optimalisasi satuan kerja dalam meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara serta Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP).

Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam area perubahan ini adalah perlu kejelasan kewenangan tim terkait prosedur penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), SPIP dan Dumas/WBS. Penguatan tim SPIP perlu lebih ditekankan dan dibina melalui pelatihan-pelatihan yang intensif dengan Lembaga pembina SPI. Diatas itu semua, perlu komitmen kuat dari pimpinan dalam mengimplementasikan area perubahan penguatan pengawasan dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

#### 8. Penguatan Kualitas Layanan Publik

Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan Kualitas Layanan Publik meliputi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Secara umum terdapat kemajuan dalam



pemberian pelayanan publik terutama yang berbasis *online*, baik website maupun android dan Survei pelayanan publik sudah dilakukan pada unit-unit pelayanan seperti KUA, Haji dan Madrasah. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti Standard pelayanan belum seluruhnya dimaklumkan terutama pada pelayanan *online*, Reviu dan revisi SOP pelayanan tidak dilakukan secara berkala, tetapi tergantung kebutuhan, Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima baru sebatas pelatihan internal, belum banyak melibatkan pihak eksternal yang ahli dalam bidang pelayanan serta belum terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

Di tahun 2018 dan 2019, area perubahan penguatan Pengawasan memiliki 6 (enam) indikator penilaian yaitu Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan layanan publik unggulan dan program prioritas. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan Kualitas Layanan Publik di tahun 2018 dan 2019 meliputi penyusunan standar layanan di PTSP sudah dilakukan, budaya pelayanan prima sudah dibangun, sudah dibuat Survey terkait kepuasan masyarakat di layanan PTSP, dan pemanfaatan teknologi informasi sudah dilakukan dengan adanya e-PTSP (atau PTSP online).

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus di area perubahan ini adalah : sarana dan prasarana pelayanan di Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Bengkulu belum lengkap, seperti belum adanya ruang konsultasi, ruang bermain anak-anak. Selain itu, kompensasi terhadap pelayanan belum terukur dan didefinisikan secara jelas. Lebih lanjut lagi, pengelolaan pengaduan terhadap layanan belum dituangkan dalam suatu prosedur/juknis yang rinci. Terakhir, RB/ZI *corner* perlu ditinjau Kembali kemanfaatannya sehingga penggunaan ruang bisa lebih optimal. beberapa kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten mulai mengintegrasikan sistem aplikasi, data, dan informasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, juga dilakukan pengembangan sarana dan prasarana terdiri dari tampilan gedung, ruang kantor, dan tata ruang pelayanan publik, agar lebih memberi rasa nyaman, aman, dan ramah. Telah dibentuk unit PTSP di Kantor wilayah dan seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Ini didukung dengan pengembangan SDM melalui penguatan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta penempatannya berdasarkan sistem meritokrasi (kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar).

### 1.1.6 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak





yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah IstimewaBengkulu berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Daerah IstimewaBengkulu, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, sedang indikator dari sasaran tersebut antara lain :

1. APK RA/ Pratama Widya Pasraman,
2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman,
3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman,
4. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman,
5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman,
6. APM MTs/Wustha/SMPTK,
7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah berkontribusi dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana di amanatkan oleh RPJMN tahun 2015-2019.

Melalui pendidikan umum berciri khas agama, dari jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan keagamaan, pada jalur formal dan non-formal. Rincian jenis dan jenjang layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama disajikan pada Tabel 1.25 berikut.

Tabel 1.30  
Jenis Pendidikan, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga,  
dan Jumlah Peserta Didik

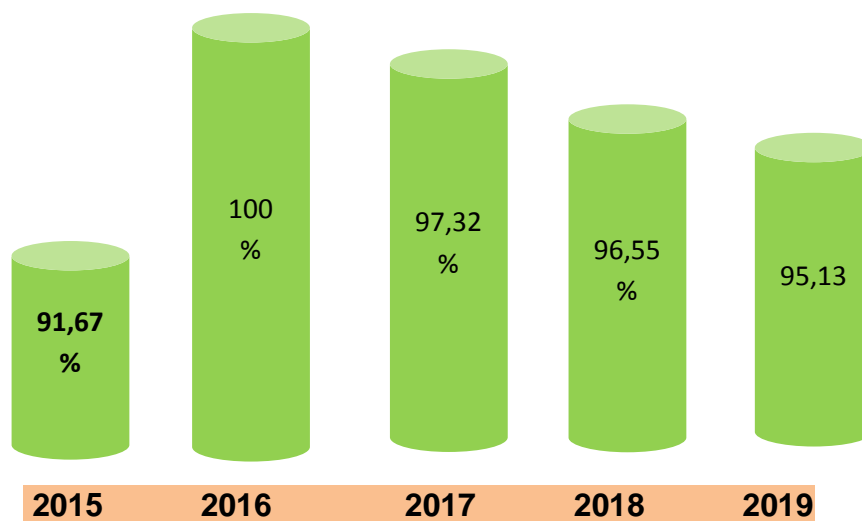
NO	JENIS	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH PESERTA DIDIK	KET
1.	Pendidikan Umum berciri khas agama	1. RA	135	5.525	
		2. MIN	41	10.526	
		3. MTsN	32	10.111	
		4. MAN	15	4.663	
		5. MIS	96	11.388	
		6. MTsS	58	7.764	
		7. MAS	40	6.309	
2.	Pendidikan Keagamaan Islam	1. Pendidikan muadalah/Diniyah Formal Ula	3	30	
		2. Pendidikan muadalah/Diniyah Formal Wustha	3	650	
		3. Pendidikan muadalah/Diniyah Formal Salafiyah Ulya	3	360	
		4. Pondok Pesantren	53	NA	



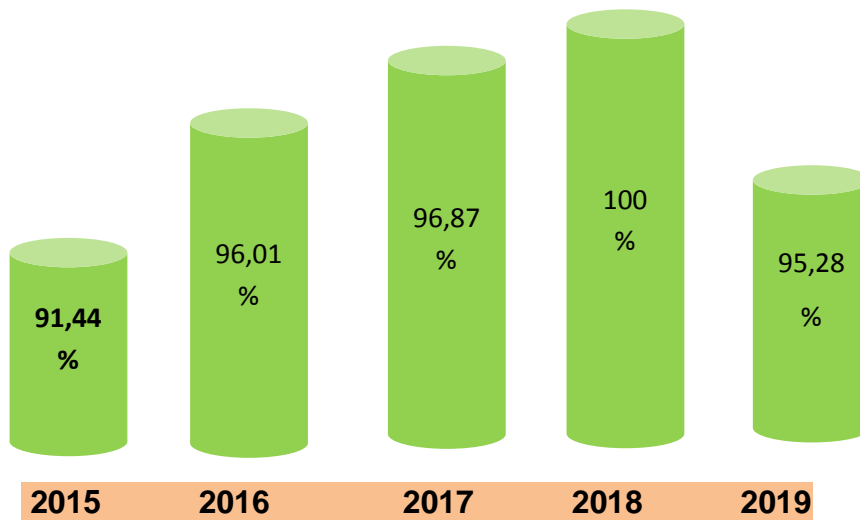
3.	Pendidikan Keagamaan Kristen	1. SDTK	-	-	
		2. SMPTK	-	-	
		3. SMTK/SMAK	-	-	
4.	Pendidikan Keagamaan Katolik	1. Taman seminari	1	10	
		2. SMAK	-	-	
5.	Pendidikan Keagamaan Hindu	1. Pratama Widya Pasraman	2	84	
		2. Adhi Widya Pasraman	14	1.531	
		3. Madyama Widya Pasraman	14	1.184	
		4. Utama Widya Pasraman	14	1.062	
6.	Pendidikan Keagamaan Budha	1. Nava Dhammasekha	1	35	

Sumber : Data Bidang Madrasah/PAKIS dan Pembimas 2019

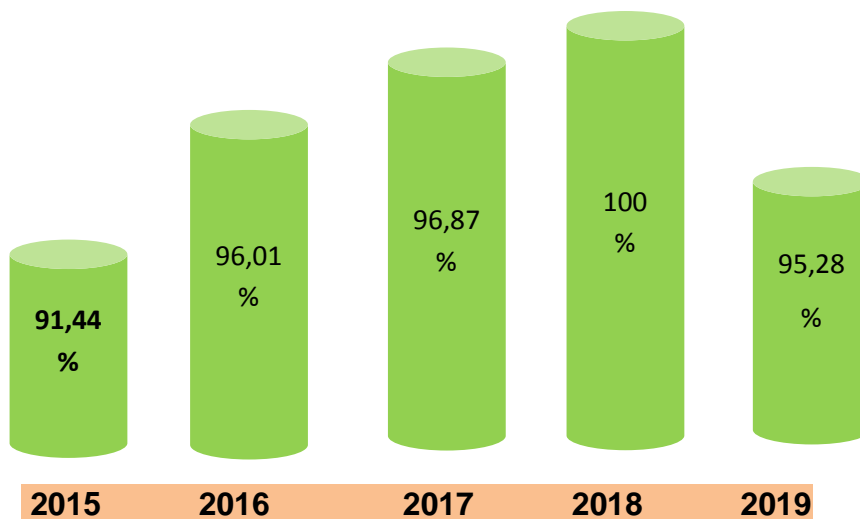
Sementara itu, perkembangan capaiannya per tahun dalam peningkatan akses selama lima tahun terkahir disajikan pada Gambar 1.12 s.d 1.18



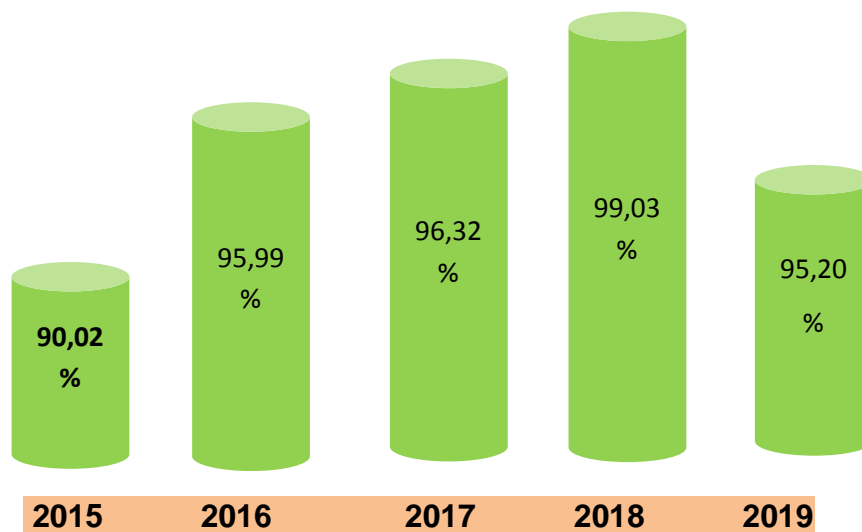
Gambar 1.13  
Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



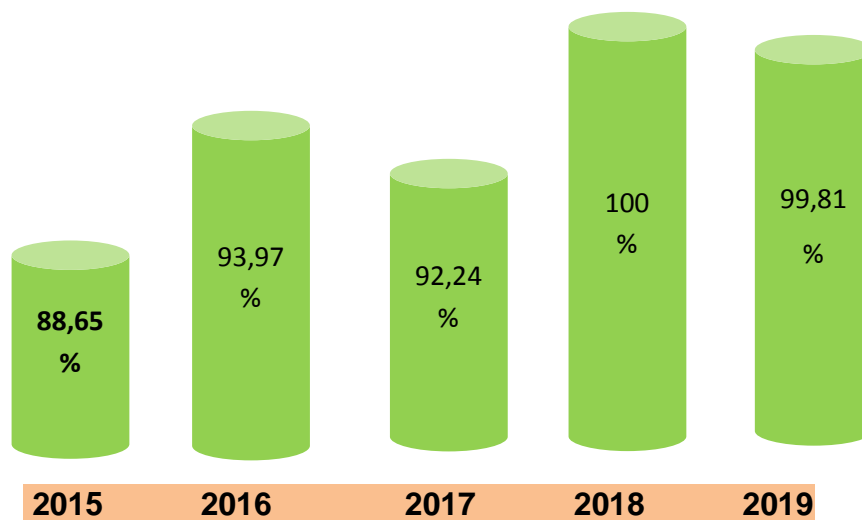
Gambar 1.14  
Grafik APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019



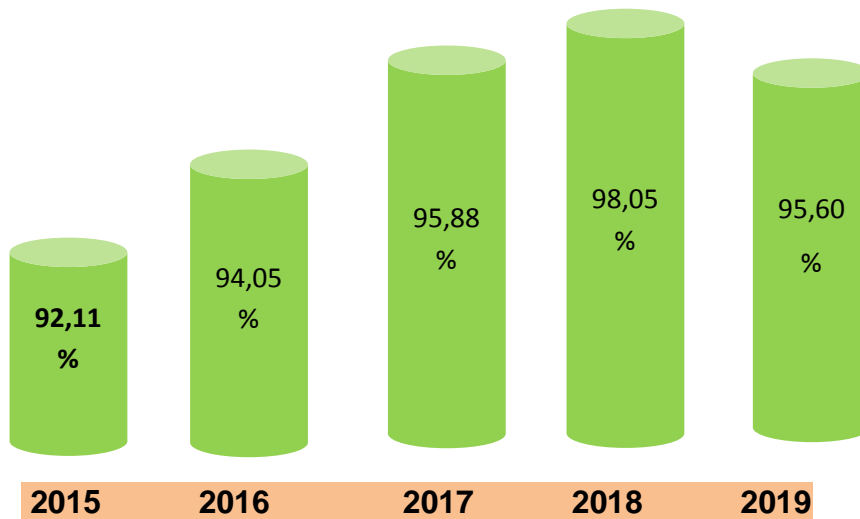
Gambar 1.15  
Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



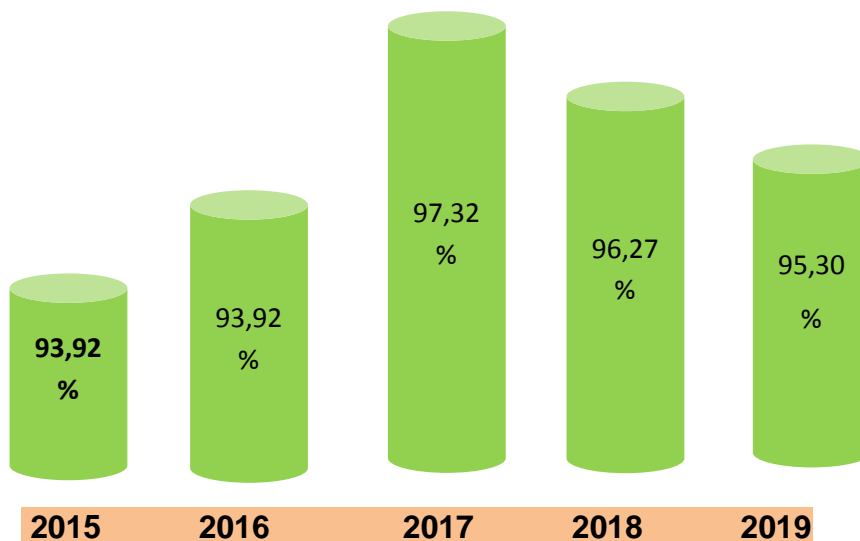
Gambar 1.16  
Grafik APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.17  
Grafik APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.18  
Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019



Gambar 1.19  
Grafik APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019

Keterangan Gambar Satuan APK dan APM = Persentase  
Sumber: Capaian Kinerja Tahun 2015-2019



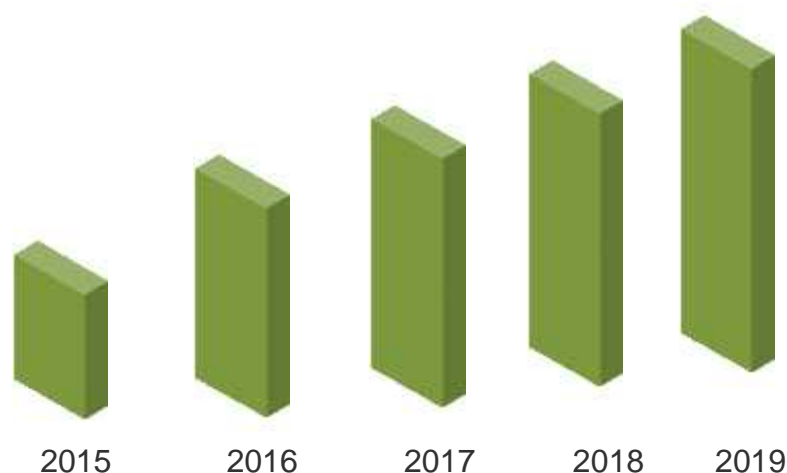
Gambar 1.13 s.d 1.18 menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan pada tingkat dasar dan menengah mengalami peningkatan jika dibandingkan target renstra sebelumnya Renstra sebelumnya. Peningkatan akses ini memberikan kontribusi dalam menyukseskan program Wajar Dikdas 12 Tahun yang berkualitas baik melalui madrasah maupun satuan pendidikan keagamaan. Kenaikan APK jika dibandingkan dengan target Renstra sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.31  
Jumlah Siswa Tahun 2015-2019

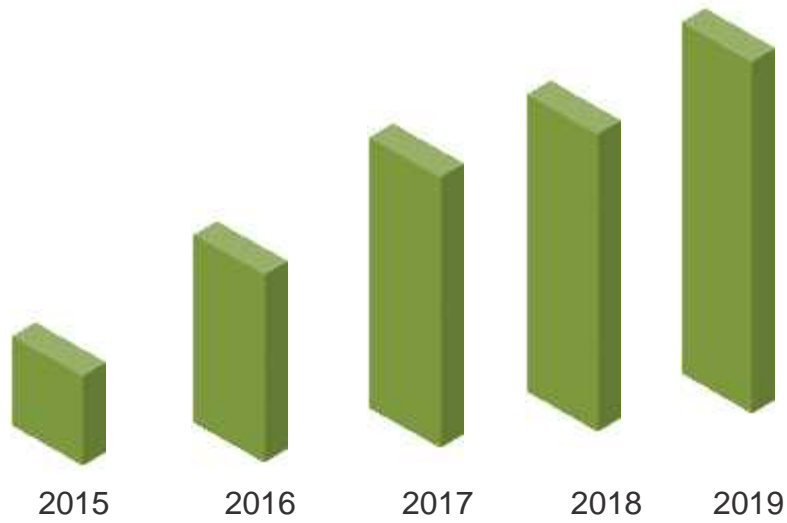
No	Jenis Lembaga	Jumlah Siswa				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	RA	4.711	4.967	5.055	5.321	5.525
2.	MIN	9.458	10.039	10.072	10.145	10.526
3.	MTsN	3.996	4.284	4.423	5.155	10.111
4.	MAN	2.917	3.811	4.034	4.455	4.663
5.	MIS	9.512	9.655	10.131	10.284	11.388
6.	MTsS	4.285	4.385	4.618	4.836	7.764
7.	MAS	3734	4.827	4.934	5.962	6.309
<b>Jumlah</b>		<b>38.613</b>	<b>41.968</b>	<b>43.267</b>	<b>46.158</b>	<b>56.286</b>

Sumber : Data Bidang Madrasah/PAKIS 2019

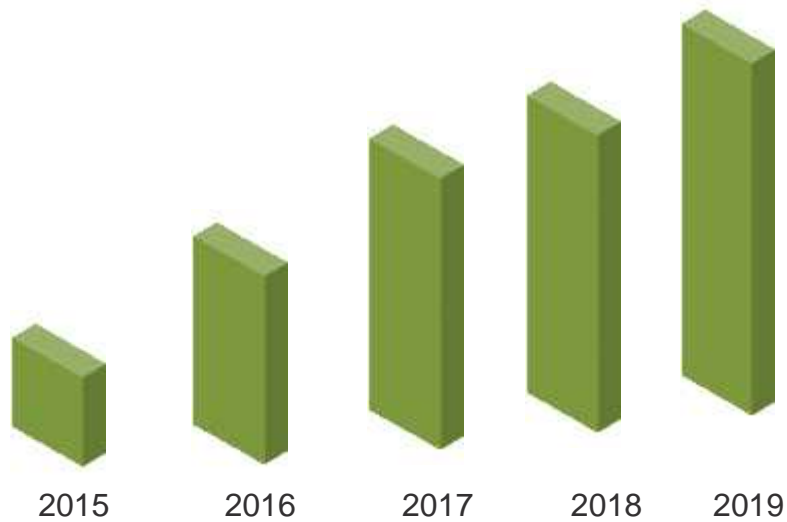
Kecendrungan peningkatan jumlah siswa madrasah setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



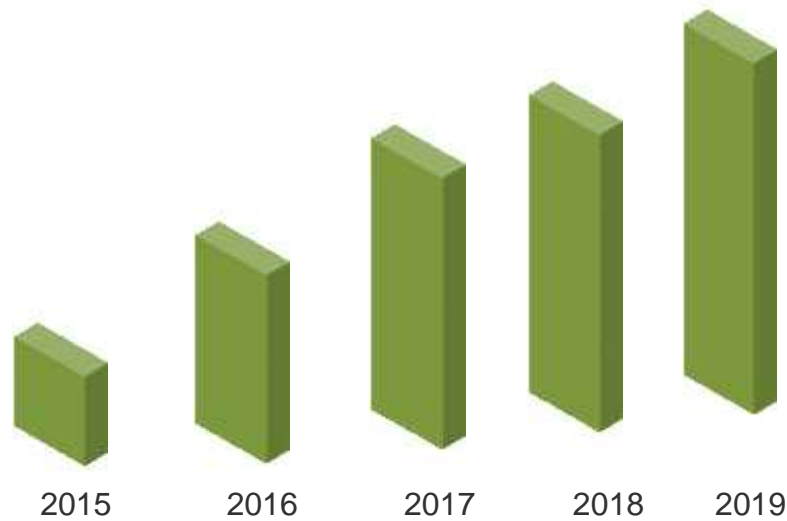
Gambar. 1.20  
Grafik Jumlah Siswa RA tahun 2015-2019



Gambar. 1.21  
Grafik Jumlah Siswa MI tahun 2015-2019



Gambar. 1.22  
Grafik Jumlah Siswa MTs tahun 2015-2019



Gambar. 1.23  
Grafik Jumlah Siswa MA tahun 2015-2019

Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualifikasi tenaga pendidik, upaya pensertifikasian tenaga pendidik terus diupayakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Rasio jumlah siswa madrasah dengan jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi sampai tahun 2019 adalah : 56.362 : 38 artinya guru yang memiliki sertifikasi pendidik mengampuh 1 :38 siswa .

Untuk melihat data guru pada madrasah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.32  
Jumlah Peserta Didik dan Guru pada Madrasah tahun 2019

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik	Kualifikasi Guru		
			PNS	Non PNS	Sertifikasi
1.	RA	5.525	17	565	89
2.	MI	21.914	554	1.430	574
3.	MTs	17.875	496	1.348	471
4.	MA	10.972	372	903	361
<b>JUMLAH</b>		<b>56.286</b>	<b>1.439</b>	<b>4.246</b>	<b>1.495</b>

Sumber : data Bidang Pendidikan Madrasah Tahun 2019

Upaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Bengkulu untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kanwil Kementerian Agama bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan





Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya, SD, SMP dan SMAK Agama Kristen. Data alokasi anggaran BOP bagi Raudhatul Athfal dan BOS untuk lembaga pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 1.33  
Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun 2019

No	Jenis Lembaga	Agama	Jenis Bantuan	Lembaga Pendidikan	2019 (siswa)
1	Pendidikan Umum berciri khas agama	Islam	BOP	RA	5.525
			BOS	MI	2.976
			BOS	MTs	2.001
		Kristen	BOS	MA	1.121
			BOS	SDTK	-
			BOS	SMPTK	-
			BOS	SMTK	-
2	Pendidikan Keagamaan	Islam	BOS	Penddikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula	30
			BOS	Penddikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Wustha	650
			BOS	Penddikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ulya	360
		Katolik	BOS	Taman seminari	-
			BOS	SMAK	-
		Hindu	BOS	Pratama Widya Pasraman	-
			BOS	Adhi Widya Pasraman	-
			BOS	Madyama Widya Pasraman	-
			BOS	Utama Widya Pasraman	-
		Budha	BOS	Nava Dhammasekha	-

Sumber : Data Statistik Perencanaan 2019



Tabel 1.34  
Data Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDTA)  
se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Kab/Kota	Lembaga	Santri			Guru		
			Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1.	Kota Bengkulu	60	1044	2100	3144	70	130	200
2.	Kab. Bengkulu Utara	133	3640	3744	7384	429	230	659
3.	Kab. Bkl. Selatan	27	544	683	1227	39	41	80
4.	Kab. Rejang Lebong	11	465	519	984	32	18	50
5.	Kab. Muko-muko	170	2659	2383	5042	84	96	180
6.	Kab. Seluma	17	207	356	563	74	30	104
7.	Kab. Kaur	22	410	484	894	41	47	88
8.	Kab. Kepahiang	27	733	752	1495	38	94	132
9.	Kab. Lebong	10	208	180	388	12	13	25
10.	Kab. Bkl. Tengah	10	233	313	546	8	39	47
<b>JUMLAH</b>		<b>487</b>	<b>10143</b>	<b>11524</b>	<b>21667</b>	<b>827</b>	<b>738</b>	<b>1565</b>

Sumber : Data Bidang PAKIS 2020

Tabel 1.35  
Data Taman Pendidikan Alquran (TPQ)  
se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Kab/Kota	Lembaga	Santri			Guru		
			Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1.	Kota Bengkulu	211	3780	4350	8130	108	165	273
2.	Kab. Bengkulu Utara	100	1800	2154	3954	169	232	401
3.	Kab. Bkl. Selatan	195	2342	3201	5543	112	247	359
4.	Kab. Rejang Lebong	171	3582	3842	7424	98	90	188
5.	Kab. Muko-muko	211	3299	3487	6786	226	210	436
6.	Kab. Seluma	252	2025	3070	5095	204	300	504
7.	Kab. Kaur	161	2282	2773	5055	161	161	322
8.	Kab. Kepahiang	48	645	884	1529	51	101	152
9.	Kab. Lebong	8	91	87	178	6	9	15
10.	Kab. Bkl. Tengah	16	383	431	814	30	59	89
<b>JUMLAH</b>		<b>1373</b>	<b>20229</b>	<b>24279</b>	<b>44508</b>	<b>1165</b>	<b>1574</b>	<b>2739</b>

Sumber : Data Bidang PAKIS 2020

Tabel 1.36  
Data Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)  
se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Kab/Kota	Status		
		PNS	Non PNS	Jumlah
1.	Kota Bengkulu	156	243	399
2.	Kab. Bengkulu Utara	158	234	392
3.	Kab. Bkl. Selatan	185	130	315



4.	Kab. Rejang Lebong	178	201	379
5.	Kab. Muko-muko	132	161	293
6.	Kab. Seluma	124	21	145
7.	Kab. Kaur	72	50	122
8.	Kab. Kepahiang	130	29	159
9.	Kab. Lebong	121	41	162
10.	Kab. Bkl. Tengah	122	48	170
<b>JUMLAH</b>		<b>1378</b>	<b>1158</b>	<b>2536</b>

Sumber : Data Bidang PAKIS 2020

Tabel 1.37  
Data Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Yang Sudah Bersertifikasi  
se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Kab/Kota	Guru PAI Sudah Bersertifikasi				Jumlah
		PNS	Non PNS	Lk	Pr	
1.	Kota Bengkulu	117	31	39	109	148
2.	Kab. Bengkulu Utara	106	25	44	87	131
3.	Kab. Bkl. Selatan	80	4	32	52	84
4.	Kab. Rejang Lebong	100	18	39	79	118
5.	Kab. Muko-muko	71	39	44	67	110
6.	Kab. Seluma	69	3	27	45	72
7.	Kab. Kaur	49	10	21	38	59
8.	Kab. Kepahiang	33	3	11	25	36
9.	Kab. Lebong	48	2	14	36	50
10.	Kab. Bkl. Tengah	79	8	30	57	87
Jumlah		752	143	301	595	895

Sumber : Data Bidang PAKIS 2020

Tabel 1.38  
Data Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Yang Belum Bersertifikasi  
se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Kab/Kota	Guru PAI Sudah Bersertifikasi				Jumlah
		PNS	Non PNS	Lk	Pr	
1.	Kota Bengkulu	39	212	67	184	251
2.	Kab. Bengkulu Utara	52	209	61	200	261
3.	Kab. Bkl. Selatan	105	126	52	179	231
4.	Kab. Rejang Lebong	78	183	53	208	261
5.	Kab. Muko-muko	61	121	69	113	182
6.	Kab. Seluma	55	18	15	58	73
7.	Kab. Kaur	25	38	19	44	63
8.	Kab. Kepahiang	97	26	41	82	123
9.	Kab. Lebong	72	40	25	87	112
10.	Kab. Bkl. Tengah	42	41	25	58	83
Jumlah		626	1014	427	1213	1640

Sumber : Data Bidang PAKIS 2020



Tabel. 1.39  
Data Sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Kab/Kota	Jumlah Sekolah					Jumlah	Yg sdh bersertifikasi	Yg Blm Bersertifikasi	Lk	Pr	Jumlah	Ket
		Paud/TK	SD	SMP	SMA	SMK							
1.	Kota Bengkulu	31	110	40	22	18	221	6	0	4	2	6	
2.	Kab. Bengkulu Utara	1	264	82	28	17	392	6	0	3	3	6	
3.	Kab. Bkl. Selatan	13	119	36	16	5	189	3	0	2	1	3	
4.	Kab. Rejang Lebong	66	181	52	16	13	328	2	0	0	2	2	
5.	Kab. Muko-muko	5	125	43	16	8	197	3	0	3	0	3	
6.	Kab. Seluma	3	158	43	11	3	218	0	0	0	0	0	
7.	Kab. Kaur	172	113	41	12	9	347	2	0	1	1	2	
8.	Kab. Kepahiang	127	98	33	8	6	272	1	0	1	0	1	
9.	Kab. Lebong	2	78	23	5	5	113	4	0	2	2	4	
10.	Kab. Bkl. Tengah	13	93	32	7	3	148	4	0	1	3	4	
Jumlah		433	1339	425	142	87	2425	31	0	17	14	31	

Sumber : Data Bidang PAKIS 2020

Tabel. 1.40  
Data Pondok Pesantren Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Kab/Kota	Jumlah Lembaga	Type Pondok		Jumlah Santri Salafiyah							
			Salafiyah	Khalafiyah/ Modern	Ula		Wustho		Ulya		Jumlah	
					Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Kota Bengkulu	12	2	10	13	1	147	165	50	33	210	199
2.	Kab. Bengkulu Utara	7	1	6	5	10	139	182	80	95	224	287
3.	Kab. Bkl. Selatan	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kab. Rejang Lebong	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kab. Muko-muko	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kab. Seluma	2	1	2	0	0	10	5	11	1	21	6
7.	Kab. Kaur	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kab. Kepahiang	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kab. Lebong	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kab. Bkl. Tengah	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		55	4	52	18	11	296	352	141	129	455	492

Sumber : Data Bidang PAKIS 2020

Tabel. 1.41  
Jumlah Santri Pondok Pesantren Umum se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Kab/Kota	Jumlah Santri Pontren Umum						Ustadz		
		Mukim		Tdk. Mukim		Jumlah		Lk	Pr	Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr			
1.	Kota Bengkulu	1123	976	132	180	1255	1156	104	105	209
2.	Kab. Bengkulu Utara	335	433	195	221	530	654	86	76	162
3.	Kab. Bkl. Selatan	163	180	910	1083	1073	1263	80	248	328
4.	Kab. Rejang Lebong	184	187	121	116	305	303	56	64	120
5.	Kab. Muko-muko	989	1283	0	0	989	1283	63	52	115
6.	Kab. Seluma	106	100	0	0	106	100	12	6	18
7.	Kab. Kaur	126	116	226	213	352	329	32	44	76
8.	Kab. Kepahiang	432	504	296	253	728	757	73	72	145
9.	Kab. Lebong	11	16	36	0	47	16	3	1	4
10.	Kab. Bkl. Tengah	647	590	121	137	768	727	81	68	149
Jumlah		4116	4385	2037	2203	6153	6588	590	736	1326

Sumber : Data Bidang PAKIS 2020

Kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu madrasah negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan



santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh wilayah.

Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kanwil Kementerian Agama juga berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan santri untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk seleksi beasiswa bagi santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Dalam program tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menjalankan perannya dengan melakukan sosialisasi program serta penyelenggaraan seleksi bagi calon penerima beasiswa.

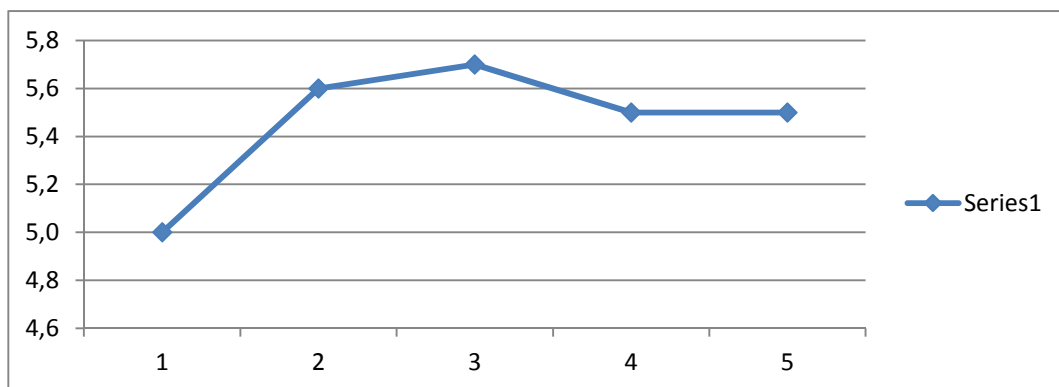
### 1.1.7. Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata Ujian Sekolah Bersandar Nasional sebagai berikut:

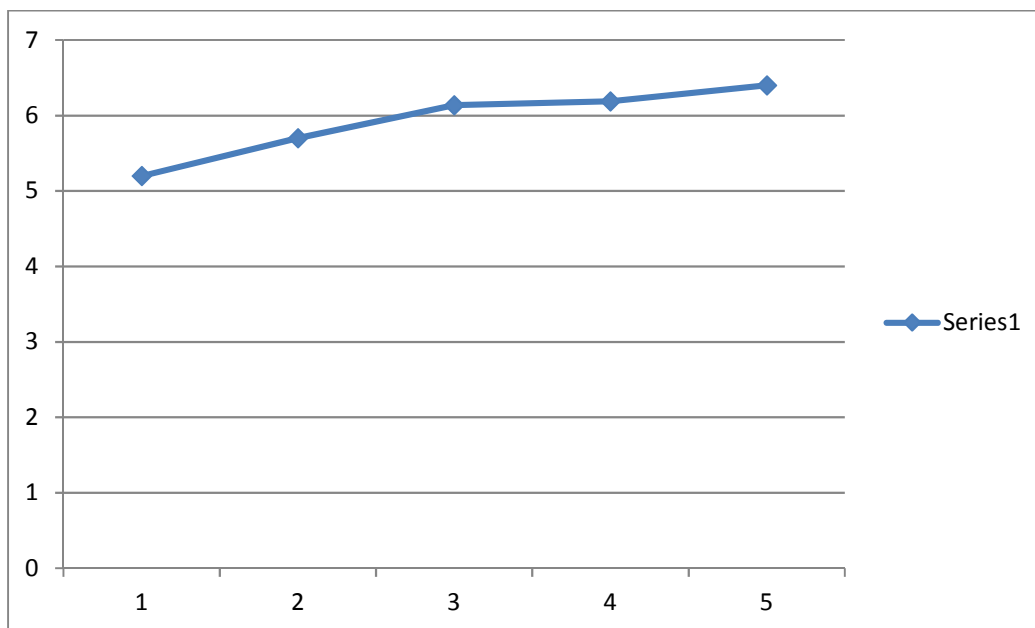
Tabel 1.42  
Data Nilai Rata-Rata Hasil USBN

Rerata Nilai USBN	2015	2016	2017	2018	2019
MTs	5,00	5,60	5,65	5,48	5,49
MA	5,20	5,70	6,14	6,19	6,40

Sumber : Capain Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu



Gambar. 1.24  
Grafik Nilai Rata-Rata Hasil USBN Tingkat MTs



Gambar. 1.25  
Grafik Nilai Rata-Rata Hasil USBN Tingkat MA

Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pada madrasah aliyah, sedangkan untuk madrasah tsanawiyah untuk tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan, hal ini disebabkan oleh transisi penyesuaian kebijakan sistem pendidikan madrasa, walaupun demikian kondisi ini tidak mengurangi minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam hal ini Bidang Pendidikan Madrasah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyusun inovasi peningkatan mutu kualitas pendidikan madrasah yaitu meningkatkan kualitas, baik pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang semakin profesional serta memperbaiki sarana dan prasarana sehingga melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas tidak kalah dengan lulusan sekolah lainnya.

Program unggulan bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2018-2019 antara lain :

1. Perbaiki mutu kualitas pelayanan terhadap madrasah di dalam bidang pendidikan madrasah dengan melaksanakan ISO 9001 tahun 2015 tentang Mutu Pelayanan, Digitalisasi tata persuratan dan PPDB online.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah daerah Provinsi Bengkulu guna meningkatkan mutu kualitas madrasah berupa bantuan hibah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2018, didalam pengelolaan hibah tersebut kedua belah pihak mencanangkan peningkatan kualitas dan pengembangan madrasah negeri antara lain Ujian Kompetensi guru, Pelatihan Kompetensi guru, tenaga kependidikan dan siswa, perbaikan sarana dan prasarana Information



and Communication Technologies dimana madrasah harus punya perpustakaan digital dan I-Board Optical Interactive Whiteboard terutama Madrasah Aliyah Negeri.

3. Melaksanakan pemetaan potensi siswa dalam rangka bersaing dalam ajang Kompetensi Sains Madrasah (KSM) yang akan dilaksanakan dalam tingkat nasional dengan mengadakan lomba-lomba tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi.
4. Melaksanakan mandatory prioritas Kementerian Agama tahun 2018 antara lain implementasi 8 area perubahan, program ngopi (ngobrol pendidikan islam), bina kawasan dan guru kunjung, mengaji (mengasah jati diri indonesia), dan E-Government.

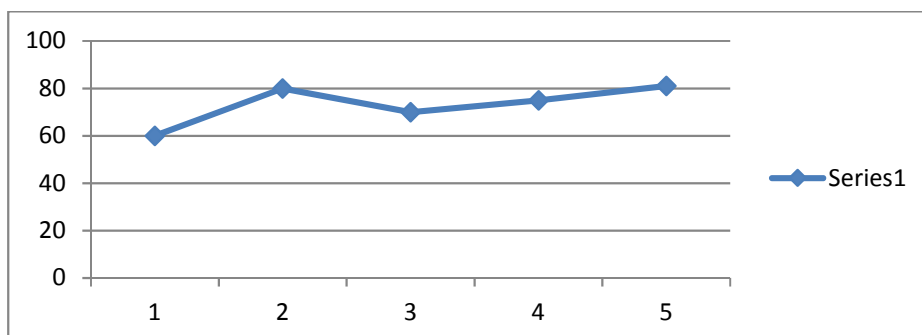
Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan empat langkah inovasi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan slogan Madrasah Hebat Madrasah bermartabat.

Aspek lain yang menjadi indikator peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan adalah indeks integritas siswa. Ada beberapa aspek yang diteliti dan diukur untuk menghasilkan indeks integritas siswa, antara lain; kejujuran, dapat dipercaya, tanggung jawab, adil dan menjaga kehormatan. Dari ke lima aspek tersebut, kondisi yang ada pada siswa madrasah di wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.43  
Indeks Integritas Siswa Madrasah se-Provinsi Bengkulu tahun 2015-2019

Tahun	Target	Capaian
2015	60	60
2016	63	80
2017	75	70
2018	76	75
2019	85	81

Sumber : Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu



Gambar 1.26  
Grafik Indeks Integritas Siswa Madrasah

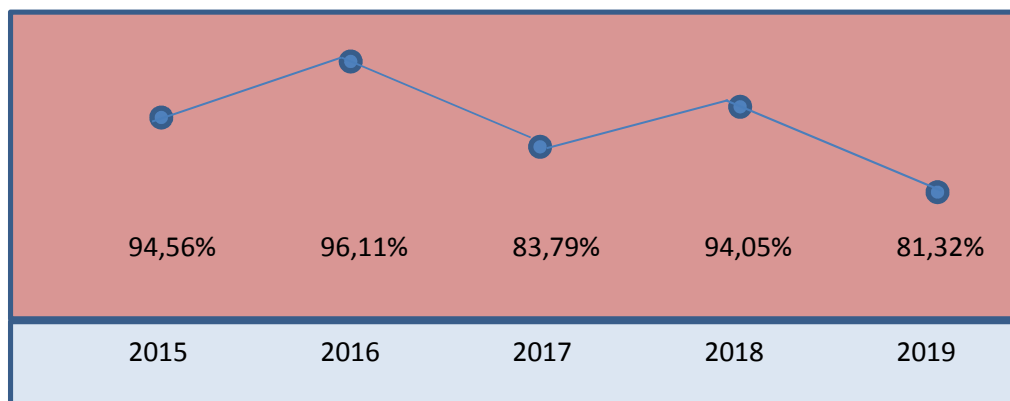


Pada awalnya, tahun 2017 integritas siswa masih diasumsikan hanya sebatas penilaian tentang kejujuran siswa dalam pelaksanaan Ujian nasional. Pada tahun 2018, aspek-aspek lain diukur dalam penilaian indeks integritas siswa. Dari target 76, capaian siswa madrasah di Provinsi Bengkulu sebesar 75,00. Namun, belum dapat diungkap, pada aspek mana nilai capaian kurang dan di aspek mana nilai yang dihasilkan cukup tinggi. Pada tahun 2019, capaian siswa madrasah Provinsi Bengkulu dalam pengukuran indeks integritas mencapai 81,00 dari angka target yang ditetapkan sebesar 85 capain ini masuk kategori baik. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang harus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Untuk melihat potret capaian kinerja dan evaluasi Rencana Strategi (RENSTRA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat dilihat dalam Trend Capain Kinerja Tahun 2015-2019 sebagaimana tergambar dalam grafik sebagai berikut :

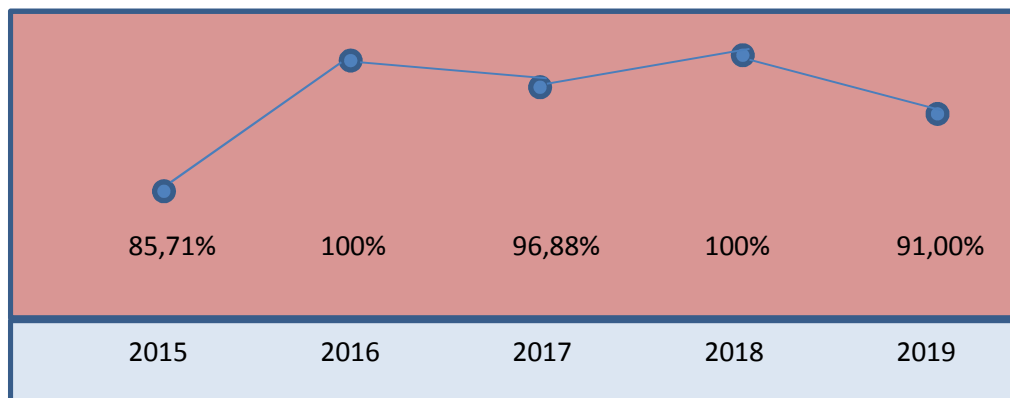
Gambar Grafik 1.27

Capain Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama Tahun 2015-2019



Gambar Grafik 1.28

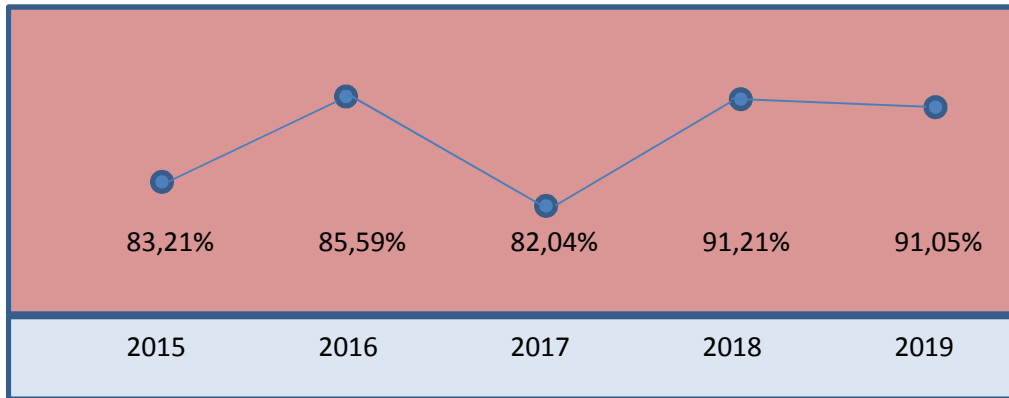
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015-2019



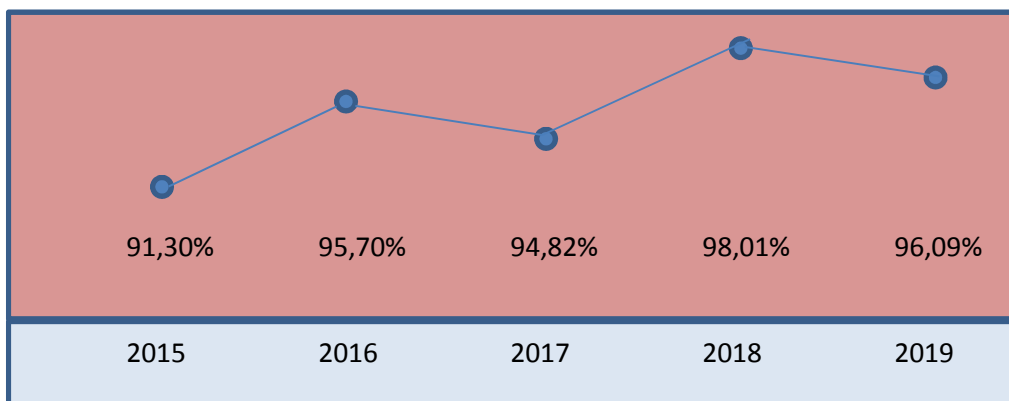




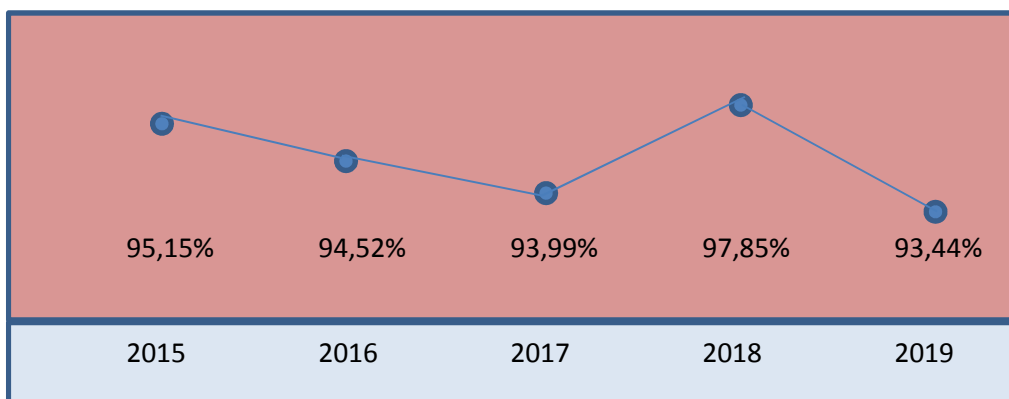
Gambar Grafik 1.29  
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan  
Tahun 2015-2019



Gambar Grafik 1.30  
Sasaran Strategis Meningkatnya Akses layanan pendidikan Tahun 2015-2019

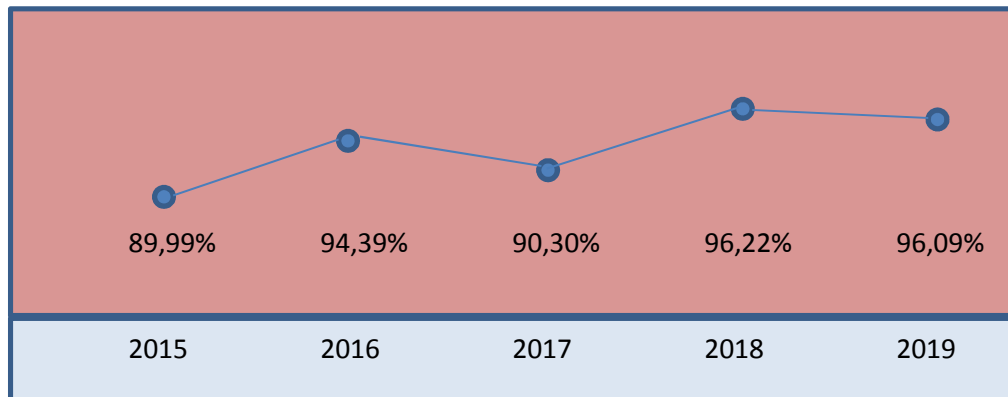


Gambar Grafik 1.31  
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama  
dan Keagamaan Tahun 2015-2019





Gambar Grafik 1.32  
Rerata Capaian Kinerja Tahun 2015-2019



Melihat trend capaian kinerja tahun 2015-2019 cenderung tidak stabil hal ini wajar, karena kebijakan setiap tahunnya sering mengalami perubahan, untuk tahun 2015-2019 terjadi revisi RENSTRA, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2015-2019.

Sementara rerata capaian kinerja tahun 2015-2019 terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan, tahun 2016 peningkatan sebesar 4,4 % dibandingkan tahun 2015, tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 4,09 % dibandingkan tahun 2016, tahun 2018 mengalami peningkatan 5,92 % jika dibandingkan tahun 2017, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 0,13 %, dengan demikian kategorisasi trend capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2015-2019 sangat baik yaitu 93,39 %.

Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat dikatakan berhasil walaupun masih terdapat beberapa evaluasi untuk perbaikan terhadap RENSTRA tahun 2020-2024.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa memengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada masa-masa mendatang.

### 1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Potensi yang dimiliki Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama :



Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

Terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila, pembunuhan serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya;

### **1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama**

Potensi yang dimiliki Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama :

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB Provinsi Bengkulu dan 10 FKUB Kabupaten/Kota;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
- b. Masih kurangnya juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
- c. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;



- d. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

### 1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Potensi yang dimiliki Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama :

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;
- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;
- d. Adanya prodi Manajemen Haji dan Umroh di IAIN Bengkulu memberikan pengakuan bahwa Manajemen Haji dan Umrah merupakan ilmu yang selalu dikaji dan berkembang, menjadi standar ideal dari sudut keilmuan sehingga dapat dijadikan alat ukur dalam menilai penyelenggaraan haji dan umrah. Hasil penelitian yang telah dilakukan mahasiswa memberikan kontribusi yang dapat dijadikan referensi untuk peningkatan penyelenggaraan haji dan umroh dari segala aspek;
- e. Adanya peningkatan status asrama haji Bengkulu menjadi Asrama Embarkasi Haji Antara diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi, dan pengembangan sektor yang lain.

Pada posisi inilah sangat mungkin diwacanakan untuk peningkatan Asrama Haji Antara Menjadi Asrama Haji Embarkasi Haji penuh. Nantinya Asrama Haji Embarkasi Bengkulu dapat melayani jema'ah haji wilayah Bengkulu dan Provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Lampung.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :



- a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa bidang pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

#### 1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
- c. Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengenai pendanaan.

#### 1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

- c. Kota Bengkulu sebagai kota pelajar, terdapat banyak perguruan tinggi yang dapat dilakukan kerjasama untuk pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan umum berciri agama;
- d. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
- e. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;



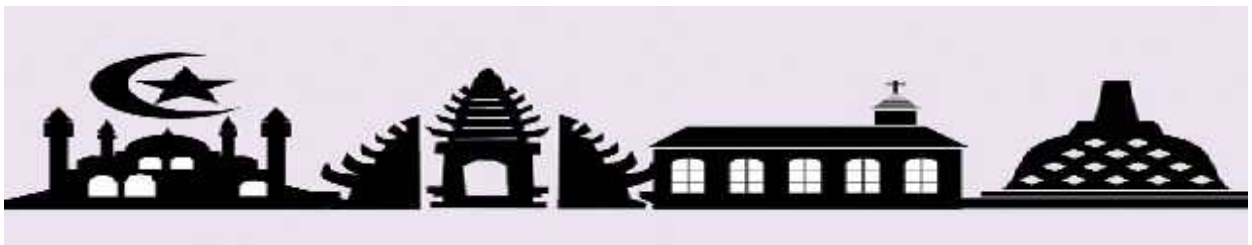
- f. Penerapan e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.
- g. Guru dan pengawas PAI di Provinsi Bengkulu banyak yang sudah ditetapkan menjadi instruktur pengembangan kurikulum 13 tingkat nasional;
- h. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan :

- a. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya.
- b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada. Masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
- d. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
- e. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.



## BAB II TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN





## BAB II TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

### 2.1 Tujuan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;





2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5)
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8).

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama RI 2020-2024, maka visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 adalah :

**“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat Bengkulu yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;**
- 2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;**
- 3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;**



4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

## 2.2 Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mendukung 11 Sasaran Strategis dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menetapkan 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan (SK) yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP) sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

### 2.2.1 Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :



1. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Nilai kinerja penyuluh agama;
  - b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
  - c. Jumlah penyiara agama yang dibina kompetensi;
  - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

**2.2.2 Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama</li> <li>2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama</li> <li>4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
  - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
  - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
  - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



- a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
  - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
  6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
    - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
    - c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
    - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
  7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
  8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
    - b. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
    - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
    - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
    - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
    - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
    - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
    - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
    - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
    - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
    - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
  9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;



- b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budayadengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan , yaitujumlah produk budaya berbasisagama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak);
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaituJumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll);
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agamadengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
  - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
  - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

### 2.2.3 Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan beragama kehidupan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan</li> <li>2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
  - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
  - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;



- d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
  - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
  - f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
  - g. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar (Kantor Wilayah Tertentu).
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
    - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
    - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
    - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
    - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
    - e. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina.
  3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
  4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
  5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
    - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
    - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
  6. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
    - a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;
    - b. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
  7. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.
  8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam



sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase amil yang dibina ;
  - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
  - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
  - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

**2.2.4 Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
  - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
  - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
  - d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
  - e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
  - b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;



- c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
  - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
  - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
  - f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
    - a. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
    - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan pendidikan akses	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
  - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
  - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;
  - b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;





- c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan;
  - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;
  - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
    - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
  4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
  - b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
  - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
  - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;
  - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.
2. Terpenuhiya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
  - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG;
  - b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;



- c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1;
  - d. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan
- a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus
  - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu :

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu :

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/SMAK/Pesantren/Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
  - b. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
  - c. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.
2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan



keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;

- b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

### 2.2.5 Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
  - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
  - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
  - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
  - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
  - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
  - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
  - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
  - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
  - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
  - g. Persentase data ASN yang diupdate;
  - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
4. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
  - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern



- Pelaporan Keuangan (PIPK);
- c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
  - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
5. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
    - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
    - c. Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN.
  6. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
    - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
    - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
  7. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
    - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
    - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
  8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
    - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
    - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
  9. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
    - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
  10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
  11. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
    - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
    - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;



- d. Persentase menurunnya lelang gagal;
  - e. Persentase menurunnya sanga dan sanga banding.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
  13. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
    - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
  14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
    - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
  15. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

### 2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai Sasaran Kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, cara pengukuran, penanggung jawab, sumber data, dan periode pelaporan. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.66

**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai kinerja penyuluh agama</li> <li>2. Persentase penyuluh agama yang dibina</li> <li>3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi</li> <li>4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan IKPAI</li> <li>2. jumlah penyuluh yang dibina dibagi jumlah seluruh penyuluh yang ada dikalikan 100%</li> <li>3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensinya</li> <li>4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan</li> </ol>	Penais Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Subbag KUB	Penais Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Subbag KUB	<p>Tahunan</p> <p>Triwulanan</p> <p>Triwulanan</p> <p>Triwulanan</p>



2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti</li><li>2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina</li><li>3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghitung keseluruhan kasus pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti atau dengan membandingkan jumlah kasus yang sudah ditindaklanjuti dan masih dalam proses penyelesaian</li><li>2. Menghitung keseluruhan aktor kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan atau dengan membandingkan jumlah aktor kerukunan yang mengikuti setiap kegiatan pembinaan dengan yang tidak mengikuti</li><li>3. Menghitung keseluruhan desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan atau dengan membandingkan jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti setiap kegiatan pembinaan dengan yang tidak mengikuti</li></ol>	KUB	KUB dan Ortala	Tahunan  Tahunan  Tahunan
---	--	---	--	-----	----------------	---------------------------------------



3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	1. Jumlah Update Data Valid Lembaga agama, Organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitasi	KUB	KUB dan Ortala	Tahunan
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	KUB	KUB dan Ortala	Tahunan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Layanan Sekber FKUB melalui BOP	KUB	KUB dan Ortala	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	KUB, Penais Zawa	KUB dan Ortala, Penais Zawa	Tahunan
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	KUB, Penais Zawa	KUB dan Ortala, Penais Zawa	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh yang mengikuti pembinaan/seminar moderasi beragama	Penais zawa, Semua Bimas	Penais zawa, Semua Bimas	Tahunan





7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase rumah ibadah yang ramah</li><li>2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina</li><li>3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya</li><li>4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah rumah ibadah yang ramah</li><li>2. Perbandingan antara pengelola rumah ibadah yang dibina dengan jumlah pengelola rumah ibadah keseluruhan</li><li>3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya</li><li>4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan</li></ol>	Urais, Semua Bimas	Urais, Semua Bimas	Tahunan
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Volume siaran keagamaan di media massa, elektronik maupun ruang publik	Penais zawa, Semua Bimas	Penais zawa, Semua Bimas	Tahunan



9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>b. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama</li> </ol>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan
---	--	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------	---------



10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase pesantren yang berwawasan moderat</li> <li>Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pesantren yang mengikuti penguatan moderasi beragama dibagi Jumlah Pesantren yang belum berwawasan moderat dikali 100%</li> <li>Jumlah Kenaikan Peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al-Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmilyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali 100%</li> </ol>	Bidang Pakis	Bidang Pakis	Tahunan
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	KUB	KUB dan Ortala	Semesteran
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Frekuensi penyelenggaraan kegiatan, tempat ibadah memberikan manfaat	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Bidang Urais, Penais zawa, semua Bimas	Tahunan
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesarawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Frekuensi penyelenggaraan kegiatan /event keagamaan, toleran, memberikan manfaat	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina</li> <li>Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina</li> <li>Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina</li> </ol>	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Tahunan



15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;</li> <li>2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;</li> <li>3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;</li> <li>4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;</li> <li>5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;</li> <li>6. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;</li> <li>7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;</li> <li>2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;</li> <li>3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;</li> <li>4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;</li> <li>5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;</li> <li>6. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;</li> <li>7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar</li> </ol>	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas	Tahunan
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina</li> </ol>	Bidang Urais, Penais zawa	Bidang Urais, Penais zawa	Tahunan Tahunan Bulanan Bulanan Semesteran



17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Jumlah keluarga yang mengikuti bimbingan dan layanan	Bidang Urais, Penais zawa, Semua Bimas	Bidang Urais, Penais zawa, Semua Bimas	Tahunan
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah KBIH yang terbina dan Terawasi dibagi Jumlah Keseluruhan KBIH dikalikan 100%	Bidang Haji	Bidang Haji	Tahunan
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</li> <li>Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Bangunan gedung PLHUT yang diusulkan dan dilaksanakan dan jumlah Seksi PHU Kab. Kota yang dibangun PLHUT dan menerapkan pelayanan haji sesuai dengan standar SOP, SPM dan kode etik ASN</li> <li>Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan dibandingkan dengan jumlah kouta berangkat haji DIY</li> </ol>	Bidang Haji dan Umroh	Bidang Haji dan Umroh	Tahunan  Tahunan
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan</li> <li>Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan</li> <li>Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu</li> </ol>	Bidang Haji dan Umroh	Bidang Haji dan Umroh	Tahunan  Tahunan
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Bidang Haji dan Umroh	Bidang Haji dan Umroh	Tahunan



22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Bidang Haji dan Umroh	Bidang Haji dan Umroh	Tahunan
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase amil yang dibina</li> <li>2. Persentase lembaga zakat yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase amil yang dibina ;</li> <li>2. Persentase lembaga zakat yang dibina</li> </ol>	Bidang Penais zawa	Bidang Penais zawa	Tahunan
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembaga wakaf yang dibina</li> <li>2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan</li> <li>3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga wakaf yang dibina</li> <li>2. Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan</li> <li>3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat</li> </ol>	Bidang Penais zawa	Bidang Penais zawa	Tahunan
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</li> <li>4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;</li> <li>5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</li> <li>4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;</li> <li>5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</li> </ol>	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan



26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan ;</li> <li>5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan .</li> <li>6. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan ;</li> <li>5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan</li> <li>6. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan</li> </ol>	Bidang Madrasah, Pakis, Semua Bimas	Bidang Madrasah, Pakis, Semua Bimas	Tahunan
----	--	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---------



27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadala yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadala yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</li> </ol>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana</li> <li>6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</li> <li>7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>5. Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana</li> <li>6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</li> <li>7. Perbandingan sekolah minggu yang memenuhi SPM sarana prasarana dengan yang belum</li> </ol>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan
				Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan





29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;</li> <li>c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan</li> <li>d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;</li> <li>c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan</li> <li>d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;</li> </ul>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> <li>b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> <li>b. Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</li> </ul>	Bidang Dikmad, Pakis,	Bidang Dikmad, Pakis	Tahunan
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan



32	Meningkatnya ,kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;</li> <li>b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;</li> <li>c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;</li> <li>d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;</li> <li>e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;</li> <li>b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;</li> <li>c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;</li> <li>d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;</li> <li>e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ul>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> <li>2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> <li>2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> </ul>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG</li> <li>3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1</li> <li>4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG</li> <li>3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1</li> <li>4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2</li> </ul>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan



35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> </ol>	Bidang Madrasah, Pakis	Bidang Madrasah, Pakis	Tahunan
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu</li> <li>2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu</li> <li>2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</li> </ol>	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan



38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</li> <li>2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman</li> <li>3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</li> <li>2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman</li> <li>3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak</li> </ol>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</li> <li>2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</li> <li>2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina</li> </ol>	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas	Tahunan
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase produk hukum yang diterbitkan</li> <li>2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan</li> <li>3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase produk hukum yang diterbitkan</li> <li>2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan</li> <li>3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</li> </ol>	Subbag Hukum dan Kepegawaian	Subbag Hukum dan Kepegawaian	Tahunan



41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persentase rekomendasi izin orang asing	Subbag KUB	Subbag KUB	Semesteran
----	---	---	---	------------	------------	------------



42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</li> <li>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> <li>6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu</li> <li>7. Persentase data ASN yang diupdate</li> <li>8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</li> <li>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> <li>6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu</li> <li>7. Persentase data ASN yang diupdate</li> <li>8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses</li> </ol>	Subbag Hukum dan Kepegawaian	Subbag Hukum dan Kepegawaian	Semesteran
----	---	---	---	------------------------------	------------------------------	------------



43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,</li> <li>2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,</li> <li>2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	Subbag Keuangan dan BMN	Subbag Keuangan dan BMN	Semesteran
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Persentase tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Persentase tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN</li> </ol>	Subbag Keuangan dan BMN	Subbag Keuangan dan BMN	Semesteran
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Tahunan



46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</li> <li>3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</li> <li>3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</li> </ol>	Subbag Ortala dan KUB	Subbag Ortala dan KUB	Tahunan
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase output perencanaan yang berbasis data</li> <li>2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</li> <li>3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase output perencanaan yang berbasis data</li> <li>2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</li> <li>3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</li> </ol>	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tahunan
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</li> <li>2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</li> <li>2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional</li> </ol>	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tahunan
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Humas	Tahunan



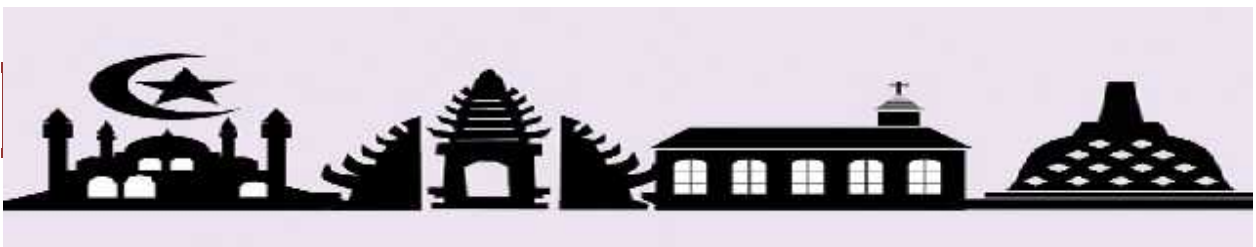


50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</li> <li>2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik</li> <li>3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</li> <li>4. Persentase menurunnya lelang gagal</li> <li>5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</li> <li>2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik</li> <li>3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</li> <li>4. Persentase menurunnya lelang gagal</li> <li>5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding</li> </ol>	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Humas	Tahunan
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Humas	Triwulan
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</li> <li>2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</li> <li>2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter</li> </ol>	Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat	Subbag Umum dan Humas	Semesteran
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar</li> <li>2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar</li> <li>2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable</li> </ol>	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Semesteran
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Pembimas	Pembimas	Triwulan

Sumber : Perdatin, 2020



### BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





### BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Agama memiliki strategi melalui 9 (Sembilan) Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen,
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik,
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu,
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha,
9. Program Kerukunan Umat Beragama.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan tersebut melalui program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
4. Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam



11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
15. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu
16. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
17. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha
18. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
19. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
20. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
21. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
22. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
23. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
24. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
25. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
26. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
27. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
28. Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu
29. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
30. Pelayanan Haji Dalam Negeri
31. Pembinaan Haji
32. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
33. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
34. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
35. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
36. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
37. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen
38. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
39. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu
40. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha
41. Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu
42. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
43. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
44. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
45. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
46. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
47. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Agama menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 54 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut



Tabel 3.45  
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu  
Sampai dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	NA	90	Nilai	Penais Zawa, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Subbag KUB
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	85	95	%	
		3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	NA	557	Orang	
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	NA	45	Kelompok	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	100	%	KUB dan Ortala
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	250	300	Orang	
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	1	3	Desa	
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	NA	500	Lembaga/Orang	KUB dan Ortala
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	3	10	Keg	KUB dan Ortala
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	%	KUB dan Ortala



5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	80	100	%	KUB dan Ortala, Penais Zawa
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	5	10	Kegiatan	KUB dan Ortala, Penais Zawa
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	50	100	%	Penais zawa, Semua Bimas
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	50	70	%	Urais, Semua Bimas
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	55	80	%	
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	11	24	Orang	
		4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	11	22	Lokasi	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	NA	50	Kegiatan/Konten	Penais zawa, Semua Bimas



9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	80	95	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	75	100	%	
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	80	90	%	
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	85	100	%	
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	80	90	%	
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	85	100	%	
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	85	95	%	
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	70	100	%	
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	75	90	%	
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;	50	80	Kegiatan	
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	30	75	Kegiatan	



10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	6	50	%	Bidang Pakis
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	6	50	%	
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	NA	11	Lokasi	KUB dan Ortala
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	NA	10	Lokasi	Bidang Urais, Penais zawa, semua Bimas
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	15	20	Event	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	11	15	KUA	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas
		2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	11	35	Pengelola	





15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	124	164	Paket	Bidang Urais Penais zawa, semua Bimas
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	NA	1.500	Buah	
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	40	50	%	
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	5	10	Layanan	
		5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	80	140	Lokasi	
		6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;	NA	50	Orang	
		7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	0	0	Lokasi	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	17	50	KUA	Bidang Urais, Penais zawa
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	36	126	KUA	
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	NA	1000	Orang	
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	NA	150	Anak	
		5. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	0	0	Orang	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	NA	100	Keluarga	Bidang Urais, Penais zawa, Semua Bimas



18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	80	100	%	Bidang Haji dan Umroh
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	70	100	%	Bidang Haji dan Umroh
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	70	100	%	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	70	100	%	Bidang Haji dan Umroh
		2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	100	%	
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	%	Bidang Haji dan Umroh
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100	100	%	Bidang Haji dan Umroh
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina	75	95	%	Bidang Penais zawa
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina	75	95	%	
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	0	50	%	Bidang Penais zawa
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	50	95	%	
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	85	95	%	



25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	20	85	%	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	50	55	%	
		3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	60	65	%	
		4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;	4	30	Madrasah	
		5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	4	30	Madrasah	



26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	80	85	%	Bidang Madrasah, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	50	60	%	
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	70	80	%	
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan ;	3	9	Penghargaan	
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan .	NA	5	Kegiatan	
		6. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	NA	85	%	
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	80	90	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	80	90	%	



28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	50	75	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	30	75	%	
		3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	35	85	%	
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	25	85	%	
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	25	85	%	
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	10	90	%	
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	5	85	%	



29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	48.471	67.859	Siswa	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;	627	878	Siswa	
		3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	NA	50	%	
		4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;	NA	50	%	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	NA	50	%	Bidang Dikmad, Pakis
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	NA	50	%	
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	5.784	8.098	Siswa	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas



32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;	NA	47	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	35	50	%	
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	35	55	%	
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	50	70	%	
		5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	70	85	%	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	85	95	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	85	95	%	



34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	80	85	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	8	38	%	
		3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	65	85	%	
		4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	NA	5	%	
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	NA	35	%	Bidang Madrasah, Pakis
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	NA	35	%	
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadallah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	NA	357	Madrasah	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	NA	5	%	Bidang Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	NA	5	%	





38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1.	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	5	70	%	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2.	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	NA	50	%	
		3.	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	NA	16	%	
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1.	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	NA	30	Organisasi Ekstrakurikuler	Bidang Dikmad, Pakis, Semua Bimas
		2.	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	58	70	Gugus	
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1.	Persentase produk hukum yang diterbitkan	75	90	%	Bag TU
		2.	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	25	100	%	
		3.	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	3	10	Kegiatan	
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri		Persentase rekomendasi izin orang asing	0	0	%	Bag TU



42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	80	90	%	Bag TU
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	75	85	%	
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	80	95	%	
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	NA	90	%	
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	NA	100	%	
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	70	90	%	
		7. Persentase data ASN yang diupdate	80	95	%	
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	75	90	%	



43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	90	108	Dokumen	Bag TU
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	25	95	%	
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	96.30	98,8	%	
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	80	100	%	
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	70	90	%	Bag TU
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	80	90	%	
		3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN	85	95		



45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	60	100	%	Bag TU
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	75	100	%	
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	70	95	%	
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	80	90	%	Bag TU
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	10	35	Satker	
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	15	35	Orang	



47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	80	95	%	Bag TU
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	80	95	%	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	65	75	%	
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	75	95	%	Bag TU
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	70	90	%	
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	85	99	%	Bag TU
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80	100	%	Bag TU
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	80	95	%	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	70	90	%	
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	60	85	%	
		5. Persentase menurunnya sengkah dan sengkah banding	70	90	%	



51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	NA	80	%	Bag TU
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	100 80	150 95	Jumlah %	Bag TU
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	11 50	15 90	% %	Bag TU
54	Meningkatnya kualitas administrasi keagamaan pendidikan	Persentase Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	85	100	%	Bag TU

Sumber : Perdatin, 2020



## 2.3 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumber daya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama 2020- 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Disamping itu terdapat kegiatan yang sasarannya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sedangkan anggarannya berada pada Unit Eselon I Pusat antara lain : anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah, Bantuan Sarpras Madrasah Swasta, Pengadaan Kitab Suci (Al-Qur'an) dan Pengadaan Buku Nikah.

Adapun Rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama sampai dengan 2024 melalui sumber pembiayaan APBN pada tabel berikut :

**Tabel 3.46**  
**Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program**  
**Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020					
<b>KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU</b>	<b>592.991.898</b>					
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama dan Program KUB</b>	<b>37.933.403</b>					
<b>Program Bimbingan Masyarakat Islam</b>	<b>100.799.546</b>					



<b>Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah</b>	<b>67.876.123</b>					
<b>Program Pendidikan Islam</b>	<b>377.081.090</b>					
<b>Program Bimas Kristen</b>	<b>2.232.151</b>					
<b>Program Bimas Katolik</b>	<b>2.036.309</b>					
<b>Program Bimas Hindu</b>	<b>2.917.317</b>					
<b>Program Bimas Budha</b>	<b>2.115.959</b>					

Sumber : Subbag Perdatin, 2020

**Tabel 3.47**  
**Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program**  
**Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024**

Program / Kegiatan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU</b>	1.454.905.229	1.562.073.616	1.683.710.487	1.806.325.968	6.507.015.300
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	750.631.32	803.164.115	883.007.331	974.791.724	3.411.594.495
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	35.000	40.000	45.000	50.000	170.000





Pembinaan Administrasi Kepegawaian	250.000	300.000	350.000	350.5000	1.250.500
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	50.500.150	50.500.300	51.600.182	52.728.182	205.328.814
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	100.000	120.000	130.000	150.000	500.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	350.300	350.400	400.500	450.500	1.551.700
Pembinaan Administrasi Umum	10.200.325	11.500.325	12.600.000	13.500.000	47.800.650
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	30.250	35.875	40.863	45.249	152.237
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	12.900.000	13.472.5000	14.871.200	14.500.125	55.744.325
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	550.713.300	595.600.638	665.765.000	750.125.500	2.562.204.438
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	120.300.150	125.500.000	130.125.500	135.250.125	511.175.775
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	1.042.550	1.142.047	1.250.600	1.320.150	4.755.347
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	1.132.500	1.250.150	2.150.500	2.350.123	6.883.273



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	789.500	850.500	950.655	1.085.170	3.675.825
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	1.050.200	1.150.130	1.200.201	1.300.500	4.701.031
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	570.050	650.100	750.150	780.300	2.750.600
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	70.600	75.150	75.300	76.350	297.400
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	70.500	75.600	76.550	78.650	301.300
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	525.450	550.400	625.130	650.300	2.351.280
<b>Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama</b>	<b>231.217.370</b>	<b>246.145.030</b>	<b>229.138.781</b>	<b>181.615.379</b>	<b>888.116.560</b>
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	101.525.325	110.550.350	115.500.325	117.550.400	445.126.400
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	22.600.450	22.750.500	23.500.550	24.550.530	93.402.030



Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	350.250	370.300	450.150	525.300	1.696.000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	11.150.600	11.250.350	11.200.300	11.350.150	44.951.400
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	350.170	425.135	550.250	670.235	1.995.790
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	350.550	425.150	450.300	525.132	1.751.132
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	625.125	650.325	725.235	850.167	2.850.852
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	25.500	30.150	35.918	39.600	131.168
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	153.000	178.350	253.125	306.525	891.000
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	50.500	55.748	61.325	70.535	238.108
Pelayanan Haji Dalam Negeri	90.535.150	95.650.870	71.550.600	20.050.900	277.787.520
Pembinaan Haji	2.273.600	2.557.675	3.557.578	3.675.680	12.064.533
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu	1.227.150	1.250.127	1.303.125	1.450.225	5.230.627



<b>Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran</b>	321.627.886	356.137.264	412.840.732	488.908.731	1.579.514.613
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	90.150.550.	98.976.850	150.050.125	155.125.200	494.302.725
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	225.354.113	250.125.114	255.150.123	325.230.256	1.055.859.606
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	415.123	450.150	455.234	467.150	1.787.657
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	30.000	35.000	35.000	36.000	136.000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	5.578.100	6.550.150	7.150.250	8.050.125	27.428.625
<b>Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>	151.428.648	156.627.207	158.723.643	161.010.134	627.789.632
Peningkatan Akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan keagamaan islam	150.145.245	155.140.235	157.150.250	159.202.101	621.637.831
Peningkatan mutu dan relevansi madrasah	125.150	150.235	167.476	202.524	645.385
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	120.125	150.200	155.500	225.234	651.059
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	437.612	501.412	550.267	625.150	2.114.441

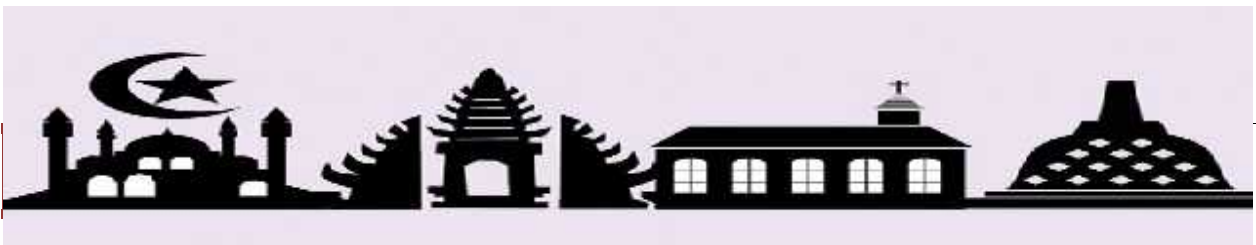


Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	550.516	635.125	650.150	705.125	2.540.916

Sumber : Subbag Perdatin, 2020



## BAB IV PENUTUP





## BAB IV PENUTUP

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

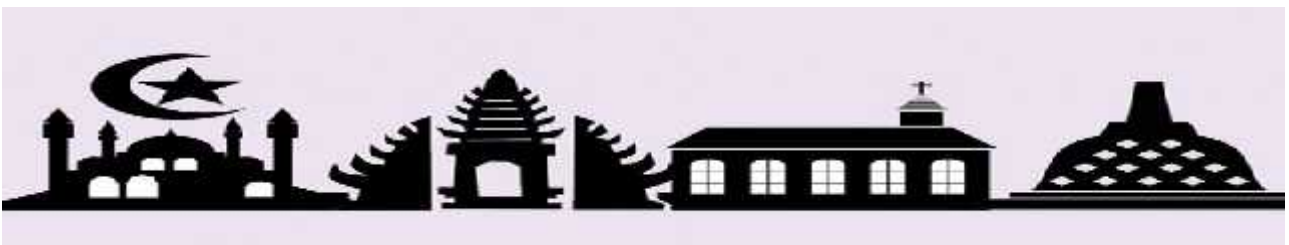
Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah dalam mewujudkan pembangunan bidang agama maupun bidang pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari semua pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Provinsi Bengkulu,  
  
H. Zahdi, M.HI 



LAMPIRAN  
MATRIK KINERJA  
DAN PENDANAAN 4 PROGRAM





Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan 4 Program

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU  
 NOMOR : 495 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020-2024

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA					ALOKASI PENDANAAN (Rp.000)				PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT								1.454.905.229	1.562.073.616	1.683.710.487	1.806.325.968	KEPALA KANWIL/ KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	
I	DUKUNGAN MANAJEMEN							750.631.32	803.164.115	883.007.331	974.791.724	BAGIAN TATA USAHA/ BIDANG/ BIMAS/ SUBAG TATA USAHA/ SEI BIMAS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/ KOTA	
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN								35.000	40.000	45.000	50.000	Subag Hukum dan Kepegawaian serta Subag TU pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
SK1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	25	70	75	85	95	100				
		2 Jumlah penulisan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	3	NA	3	4	5	10				
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian								250.000	300.000	350.000	350.000	Subag TU pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
SK2	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimun 71)	%	NA	75	75	80	85	90				
		2 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	75	80	85	90	95	100				
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN								50.500.150	50.500.300	51.600.182	52.728.182	Subag Keuangan dan BMN serta Kasubag TU pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
SK3	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran dan aset BMN	1 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	96.30	97	98	98,5	98,7	98,8				
		2 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Laporan	90	108	108	108	108	108				
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan tata laksana								100.000	120.000	130.000	150.000	Subag Ortala dan KUB serta Subag TU pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
SK4	Meningkatnya kualitas penilaian dan penguatan manajemen organisasi	1 Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	60	65	70	80	85	100				
		2 Persentase laporan kinerja satuan kerja yang dievaluasi	%	75	80	85	90	95	100				
		3 Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya	Bh	9	9	10	10	15	20				
		4 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	70	75	80	85	90	95				
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan								350.300	350.400	400.500	450.500	Subag Perdatin dan Subag TU pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
SK5	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra	1 Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah sesuai Renstra	%	80	80	85	90	90	95				
		2 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar	Dokumen	70	75	80	85	90	99				
SK6	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	75	80	85	90	90	95				
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	70	70	75	80	85	90				
2103	Pembinaan Administrasi Umum								10.200.325	11.500.325	12.600.000	13.500.000	Subag Umum dan Subag TU pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
SK7	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	85	90	95	95	97	99				
SK8	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	80	80	85	90	95	100				
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	80	80	85	85	90	95				
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	70	70	75	80	85	90				
		4 Persentase menurunnya lelang gagal	%	60	65	70	75	80	85				
		5 Persentase menurunnya snggah dan snggah banding	%	70	75	75	80	85	90				

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA					ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)				PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN		
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
2105	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan										30.250	35.875	40.863	45.249	
SK9	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Berita	100	100	120	130	140	150						Subag Umum dan Subag TU pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
		2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang di counter	%	80	85	85	90	90	95						
SK10	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	50	60	70	75	80	90						
2150	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PHU										12.900.000	13.472.5000	14.871.200	14.500.125	
SK11	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	80	85	85	90	95	100						Bidang PHU/ Kasi PHU pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	85	85	90	95	97	98						
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas teknis lainnya pendidikan Islam										550.713.300	595.600.638	665.765.000	750.125.500	
SK12	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pendidikan Islam	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	80	85	85	95	96	98						Bidang Pakis/Bidang Penmad/ Sei PAI dan Pontren/ Pakis/ Pendis/ Penmad/ Kepala MAN/ Kepala MTsN
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	85	85	90	95	95	98						
2125	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam										120.300.150	125.500.000	130.125.500	135.250.125	
SK13	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Islam	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	80	85	85	95	96	98						Bidang Urais Binsyar/ Bidang Penadz Zawa/ Seksi Bimbingan Masyarakat Islam/ Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	85	85	90	95	95	98						
2138	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen										1.042.550	1.142.047	1.250.600	1.320.150	
SK14	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Kristen	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	80	85	85	95	96	98						Bimas Kristen/ Sie Bimas Kristen
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output	%	85	85	90	95	95	98						
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pendidikan Bimas Kristen										1.132.500	1.250.150	2.150.500	2.350.123	
SK15	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Kristen	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	3	3	3	3	3	3						
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik										789.500	850.500	950.655	1.085.170	
SK16	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Katolik	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	80	85	85	95	96	98						Bimas Katolik/ Sei Bimas Katolik
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	85	85	90	95	95	98						
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik										1.050.200	1.150.130	1.200.201	1.300.500	
SK17	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Katolik	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	3	3	3	3	3	3						
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Bimas Hindu										570.050	650.100	750.150	780.300	
SK18	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Hindu	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	80	85	85	95	96	98						Bimas Hindu
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	85	85	90	95	95	98						
5104	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pendidikan Bimas Hindu										70.600	75.150	75.300	76.350	
SK19	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Hindu	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	3	3	3	3	3	3						
2146	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha										70.500	75.600	76.550	78.650	
SK20	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Buddha	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	80	85	85	95	96	98						Bimas Buddha
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	85	85	90	95	95	98						
5101	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pendidikan Bimas Buddha										525.450	550.400	625.130	650.300	
SK21	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Buddha	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	3	3	3	3	3	3						
II	PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA										231.217.370	246.145.030	229.138.781	181.615.379	BIDANG URAIS BINSYAR/ BIDANG PENAZ ZAWA/ BIMAS / SEKSI BIMAS/ PENYELANGGARA ZAKAT WAKAF/
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama										101.525.325	110.550.350	115.500.325	117.550.400	
SK22	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100						Subag Orta dan KUB/ Subag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	250	250	300	300	300	300						
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Lokasi	1	2	2	3	3	3						
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah										22.600.450	22.750.500	23.500.550	24.550.530	
SK23	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk	1 Jumlah KUA yang ditingkatkan mutunya (direvitalisasi)	Lembaga	17	30	35	40	45	50						Bidang Urais Binsyar Sei Bimbingan Masyarakat Islam/ Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Lembaga	36	45	60	75	90	95						
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Pasang	NA	650	750	850	950	1000						

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA					ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)				PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN	
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Orang	NA	85	90	95	100	150						
	5 Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	Buku	54000	54000	55000	56000	57000	58000						
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf								350.250	370.300	450.150	525.300		
SK24	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah	%	NA	NA	25	40	45	55					
		2 Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	%	NA	NA	25	30	35	50					
		3 Persentase lembaga zakat yang dibina	%	75	80	80	85	90	95					
SK25	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	NA	NA	25	30	40	50					
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	85	80	85	90	90	95					
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam								11.150.600	11.250.350	11.200.300	11.350.150		
SK26	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Islam	1 Nilai kinerja penyuluh agama Islam	Nilai	NA	NA	75	80	90	95					
		2 Persentase penyuluh agama Islam yang dibina	%	85	85	85	85	90	95					
		3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	NA	100	250	300	450	557					
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Islam yang diberdayakan	Kelompok	NA	NA	25	30	40	45					
SK27	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Islam	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	80	80	85	90	95	100					
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Kali	3	3	5	7	8	10					
SK28	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Islam	Persentase Penyuluh Agama Islam yang berwawasan moderat	%	50	70	75	80	95	100					
SK29	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Islam sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Agama Islam yang dibina	%	55	60	60	65	70	80					
SK30	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Islam di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan Islam yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Siaran	NA	25	30	35	40	50					
SK31	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (wisata religi, situs, artefak)	Produk	NA	5	5	6	7	10					
SK32	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan Islam dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan kebanggaan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Kegiatan	15	15	18	19	19	20					
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah								350.170	425.135	550.250	670.235		
SK33	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Paket	124	130	140	150	155	164					
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Bh	NA	NA	1000	1200	1250	1500					
		3 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Bh	80	85	90	95	100	140					
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen								350.550	425.150	450.300	525.132		
SK34	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Kristen	1 Nilai kinerja penyuluh agama Kristen	Nilai	NA	NA	75	80	85	90					
		2 Persentase penyuluh agama Kristen yang dibina	%	65	70	75	80	85	90					
		3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Kali	1	1	1	1	1	1					
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Kristen yang diberdayakan	Kelompok	NA	NA	10	10	12	15					
SK35	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Kristen	Persentase Penyuluh Agama Kristen yang berwawasan moderat	%	50	70	75	80	85	100					
SK36	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Kristen sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Kristen yang dibina	%	50	50	55	60	65	70					
SK37	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan Keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Keluarga	50	60	70	80	90	100					
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik								625.125	650.325	725.235	850.167		
SK38	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik	1 Nilai kinerja penyuluh agama Katolik	Nilai	NA	NA	75	80	85	90					
		2 Persentase penyuluh agama Katolik yang dibina	%	65	70	75	80	85	90					
		3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	1	1	1	1	1	1					
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Kristen yang diberdayakan	Kelompok	NA	NA	6	6	8	10					
SK39	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Katolik	Persentase Penyuluh Agama Katolik yang berwawasan moderat	%	50	70	75	80	85	100					
SK40	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Katolik sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Katolik yang dibina	%	50	50	55	60	65	70					

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA					ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)				PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN	
					2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
SK41	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Katolik di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan Katolik yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kali	1	1	1	1	1	1					Bimas Katolik/ Sei Bimas Katolik	
SK42	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan Keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Keluarga	NA	NA	50	60	70	80						
SK43	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan Katolik	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan Katolik yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	NA	NA	15	20	25	30						
2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu										25.500	30.150	35.918	39.600		
SK44	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Hindu	1 Nilai kinerja penyuluh agama Hindu	Nilai	NA	NA	75	80	85	90					Bimas Hindu	
		2 Persentase penyuluh agama Hindu yang dibina	%	65	70	75	80	85	90						
		3 Jumlah penyiar agama Hindu yang dibina kompetensi	Orang	NA	NA	5	8	9	10						
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Hindu yang diberdayakan	Kelompok	NA	NA	10	10	12	15						
SK45	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Hindu	Persentase Penyuluh Agama Hindu yang berwawasan moderat	%	50	70	75	80	85	100						
SK46	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Hindu sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Hindu yang dibina	%	50	50	55	60	65	70						
SK47	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Hindu di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan Hindu yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kali	1	1	1	1	1	1						
SK48	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan Keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukhava	Keluarga	NA	NA	50	60	70	80						
SK49	Meningkatnya pemberdayaan lembaga darma dana	Jumlah lembaga darma dan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	1	1	1	1	1	1						
2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha										153.000	178.350	253.125	306.525		
SK50	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha	1 Nilai kinerja Penyuluh Agama Buddha	Nilai	NA	NA	75	80	85	90					Bimas Buddha	
		2 Persentase Penyuluh agama Buddha yang dibina	%	65	70	75	80	85	90						
		3 Jumlah penyiar Agama Buddha yang dibina kompetensi	Orang	NA	NA	5	8	9	10						
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Buddha yang diberdayakan	Kelompok	NA	NA	10	10	12	15						
SK51	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Buddha	Persentase Penyuluh Agama Buddha yang berwawasan moderat	%	50	70	75	80	85	100						
SK52	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Buddhasebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Buddha yang dibina	%	50	50	55	60	65	70						
SK53	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Buddha di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan Buddha yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kali	1	1	1	1	1	1						
SK54	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan Keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhava	Keluarga	NA	NA	50	60	70	80						
SK55	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana Paramitha	Jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	1	1	1	1	1	1						
2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus										50.500	55.748	61.325	70.535		
SK56	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1 Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	80	80	85	90	95	100					Bidang PHU/ Kasi PHU pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota	
		2 Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi	%	NA	NA	50	55	60	80						
2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri										90.535.150	95.650.870	71.550.600	20.050.900		
SK57	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	70	80	85	90	95	100						
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	70	80	85	90	95	100						
SK58	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	%	70	80	85	90	95	100						
		2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	80	80	85	90	95	100						
2148 Pembinaan Haji										2.273.600	2.557.675	3.557.578	3.675.680		
SK59	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1 Persentase petugas haji yang profesional	%	100	100	100	100	100	100						
		2 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	100	100	100	100	100	100						
		3 Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100						
		4 Jumlah advokasi haji yang terselenggara	Kali	1	NA	3	5	6	10						
		5 Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	%	25	30	40	45	50	60						
2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu										1.227.150	1.250.127	1.303.125	1.450.225		
SK60	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji	%	85	NA	90	90	95	98						
SK61	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	%	100	100	100	100	100	100						

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA					ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)				PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN		
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
<b>III</b>	<b>PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN</b>										321.627.886	356.137.264	412.840.732	488.908.731	<b>BIDANG PENMAD/ BIDANG PAKIS/ KASI PAI/ PONTREN/ PAKIS/ PENDIS/ PENMAD/ KEPALA MA/ KEPALA MTS</b>
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam										90.150.550	98.976.850	150.050.125	155.125.200	
SK62	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama	1 Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama	%	47	50	55	60	70	75						
		2 Persentase GPAI di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	20	25	30	35	40						
		3 Persentase PPAI di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	10	20	30	40	50						
SK63	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga Kependidikan	Persentase GPAI yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50	55	57	60	65	70						
SK64	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase GPAI pada sekolah yang dinilai kerjanya sebagai dasar penetapan lunjangan	%	45	50	60	65	70	75						
SK65	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase GPAI yang mengikuti PPG	%	65	70	75	80	85	90						
		2 Persentase GPAI ber kualifikasi minimal S1	%	70	75	80	85	90	95						
SK66	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	1 Menguatnya GPAI yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam Pendidikan Agama	%	NA	45	50	55	60	65						
		2. Persentase PPAI yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti Dalam pendidikan agama	%	NA	35	40	45	50	55						
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas guru dan tenaga kependidikan madrasah										225.354.113	250.125.114	255.150.123	325.230.256	
SK67	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase Siswa Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	50	55	60	65	85						
		2 Persentase Guru Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	4	14	15	20	25	30						
		3 Persentase Pengawas Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	6	10	15	25	30	35						
SK68	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga Kependidikan	1 Persentase Guru pada madrasah yang lulus sertifikasi	%	45	50	55	60	65	70						
		2 Persentase tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	25	30	35	40	45	50						
		3 Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	20	25	30	35	40	45						
		4 Persentase Guru Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	15	20	25	30	35	40						
SK69	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru madrasah yang dinilai kerjanya sebagai dasar penetapan lunjangan	%	45	45	50	55	60	65						
		2 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah Tingkat Nasional	Orang	2	NA	5	7	10	10						
SK70	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG	%	2,12	NA	3,00	5,00	6,00	7,00						
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik										415.123	450.150	455.234	467.150	
SK71	Terpenuhiya jumlah Guru Agama Katolik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar	Persentase Guru Agama Katolik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	40	45	50	55	60	65						Bimas Katolik/ Sei Bimas Katolik
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu										30.000	35.000	35.000	36.000	
SK72	Terpenuhiya jumlah Guru Agama Hindu dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar	Persentase Guru Agama Hindu yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	80	80	80	80	80	80						Bimas Hindu
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Budha										5.578.100	6.550.150	7.150.250	8.050.125	
SK73	Terpenuhiya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru pendidikan agama Budha yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	85	85	85	85	85	85						Bimas Buddha
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PAUD DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN</b>										151.428.648	156.627.207	158.723.643	161.010.134	<b>BIDANG PENMAD/ BIDANG PAKIS/ KASI PAI/ PONTREN/ PAKIS/ PENDIS/ PENMAD/ KEPALA MA/ KEPALA MTS</b>
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam										150.145.245	155.140.235	157.150.250	159.202.101	
SK74	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama pendidikan	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah dan pendidikan Al-Qur'an	%	25	30	35	40	45	50						Bidang PAKIS/ Sei PAI/ Sei Pontren/ Sei PAKIS
SK75	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	1 Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	NA	30	35	40	45						

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA					ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)				PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN	
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
SK76	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	2 Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	NA	25	30	35	40					Bidang Pakis/Sei PAI/Sei Pontren/ Sei Pakis
	3 Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	NA	25	30	35	40						
	1 Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/muadalah	Santri	NA	627	750	780	830	950						
	2 Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	%	20	NA	25	30	35	40						
	3 Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah	%	NA	NA	25	30	35	40						
2129	Peningkatan Mutu dan Relevansi Madrasah								125.150	150.235	167.476	202.524		
SK77	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%			30	35	40	50					Bidang Penmad/ Sei Pendis/ Sei Penmad/ Kepala MAN/ Kepala MTsN
		2 Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	25	30	35	40	45	50					
		3 Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	20	25	30	40	45	50					
		4 Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	30	35	40	45	50	60					
		5 Persentase madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	NA	NA	25	30	35	40					
SK78	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah Siswa Madrasah Penerima BOS	Orang	NA	48471	58968	59764	59850	60125					
		2 Jumlah Siswa Madrasah Penerima PIP	%	NA	NA	25	30	35	40					
SK79	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkalkan mutunya melalui BOP	Orang	5784	6237	62300	62350	63250	63500					
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen								120.125	150.200	155.500	225.234		
SK80	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	%	NA	NA	100	100	100	100					Bimas Kristen/ Sie Bimas Kristen
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik								437.612	501.412	550.267	625.150		
SK81	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	NA	NA	100	100	100	100					Bimas Katolik/ Sei Bimas Katolik
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu								50.000	50.000	50.000	50.000		
SK82	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	NA	NA	100	100	100	100					Bimas Hindu
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha								550.516	635.125	650.150	705.125		
SK83	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	NA	40	45	50	60					Bimas Buddha